

**RADIKALISME AGAMA
DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RINI MARLINA
NIM. 140301045
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rini Marlina
NIM : 140301045
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bandá Aceh, 10 Januari 2019
Yang menyatakan,



Rini Marlina
NIM.140301045

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Aqidah dan Filsafat Islam**

Diajukan Oleh:

RINI MARLINA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam

NIM: 140301045

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dra. Suraiya IT, MA, Ph.D
NIP. 196012281988022001



Syarifuddin, S.Ag, M.Hum
NIP. 197212232007101001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Aqidah Filsafat Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 Januari 2019 M
16 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



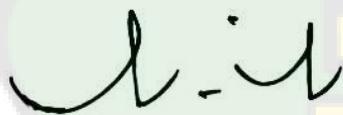
Dra. Suraiya IT, MA, Ph.D
NIP. 196012281988022001

Sekretaris,



Syarifuddin, S.Ag, M.Hum
NIP. 197212232007101001

Penguji I,



Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si
NIP. 197707042007011023

Penguji II,



Dr. Fuad Ramly, M.Hum
NIP. 196903151996031001

Mengetahui,
Dekan Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Drs. Fuadi, M.Hum
NIP. 196502041995031002

ABSTRAK

Nama / NIM : Rini Marlina / 140301045
Judul Skripsi : Radikalisme Agama dalam Pandangan Tokoh Agama Islam di Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : **88** Halaman
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Pembimbing I : Dra. Suraiya IT, MA. Ph.D
Pembimbing II : Syarifuddin, S.Ag, M.Hum

Radikalisme merupakan paham yang dapat menggoyahkan tatanan sosial dalam masyarakat terlebih jika berkaitan dengan agama. Penelitian yang berjudul “Radikalisme Agama dalam Pandangan Tokoh Agama Islam di Kota Banda Aceh” ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman tokoh agama Islam Kota Banda Aceh tentang ajaran dan gerakan radikalisme agama, faktor yang mempengaruhi perkembangan radikalisme agama dan respon tokoh agama Islam Kota Banda Aceh dalam menyikapi berkembangnya radikalisme agama tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ajaran dan gerakan radikalisme dipahami oleh tokoh agama Islam Kota Banda Aceh sebagai suatu paham yang ingin mengadakan suatu perubahan baik secara politik maupun sosial dengan jalan kekerasan, yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu ajaran radikalisme ini tidak bisa ditoleril begitu saja, karena ciri gerakannya bersifat merugikan pihak lain seperti suka menghujat gaya bicara yang keras, memaksakan kehendak orang lain, menyalahkan orang dan mengkafirkan orang. Faktor penyebab terjadinya radikalisme antara lain minim-nya pemahaman masyarakat baik mengenai agamanya maupun tentang negaranya, faktor politik dimana para politikus memakai agama sebagai benteng untuk mempro-mosikan dirinya demi kepentingan kekuasaan, adanya hasutan dan penyogokan kepada golongan awam untuk melakukan radikalisme dengan dibayar dan faktor pemerintah yang kurang memahami pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan bernegara. Tokoh agama Islam Kota Banda Aceh merespon keras ajaran dan gerakan radikalisme yakni dengan menunjukkan sikap menolak keberadaan gerakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan negara karena gerakan ini dapat merugikan orang lain serta merusak hubungan baik kehidupan berbangsa, agama dan negara.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Radikalisme Agama Dalam Pandangan Tokoh Agama Islam Di Kota Banda Aceh”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Fuadi, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Dr. Firdaus, M.Hum, M.Si, Selaku Ketua Program Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry.
3. Dra. Suraiya IT, MA. Ph.D, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Syarifuddin, S.Ag, M.Hum, sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Dr. Firdaus, M.Hum, M.Si dan Dr. Fuad Ramly, M.Hum, sebagai penguji I dan II sidang Munaqasyah Skripsi, yang telah bersedia memberikan masukan ide dan arahan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. M. Sahlan Hanafiah, M.Si, selaku dosen yang telah bersedia membimbing penulis dalam mengawali penulisan skripsi ini, serta seluruh dosen dan karyawan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Zainuddin dan Ibunda tercinta Asnani, juga nenek tercinta Siti Halimah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Adikku Rika Asmita dan seluruh keluarga besar Alm. Amir Husen yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
8. Terima kasih juga buat saudara dan sahabat keluarga Mafia'14 Syarifah Khairiah, Raudhatul Husna, Safrijal, Fadlia, Junaidi, Nailul, Radha dan teman-teman AFI'14 juga Nur Insyirah, Fanny Maulida, Muslihusen serta

teman-teman yang telah berjuang bersama di KPM Aluetho, semoga kesuksesan menghampiri kita.

9. Selain itu tidak lupa pula kepada pihak yang membantu di lapangan dan para tokoh agama Islam di Kota Banda Aceh yang telah memberikan waktu dan respon untuk proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

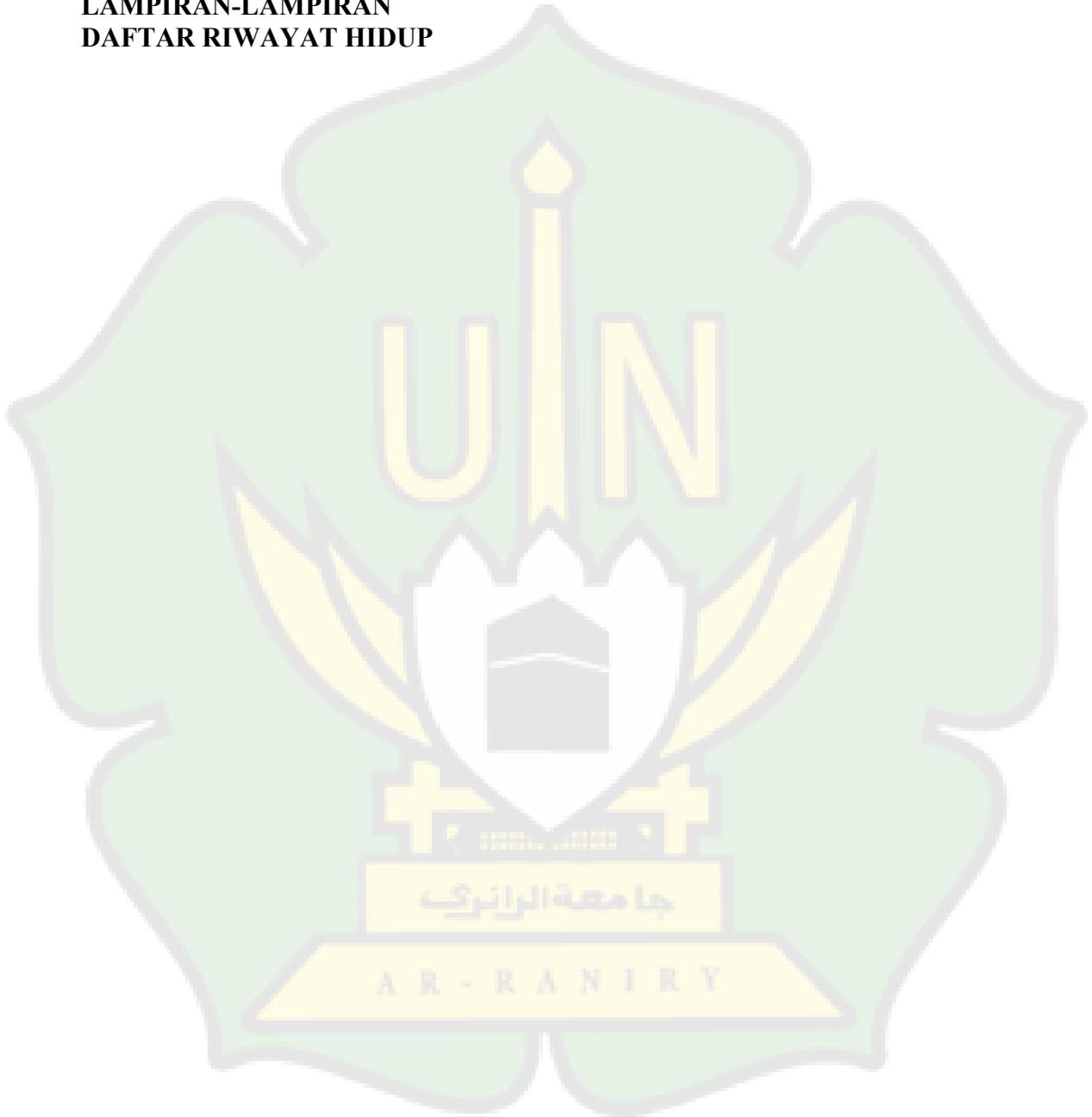
Banda Aceh, 10 Januari 2019
Penulis,

Rini Marlina

DAFTAR ISI

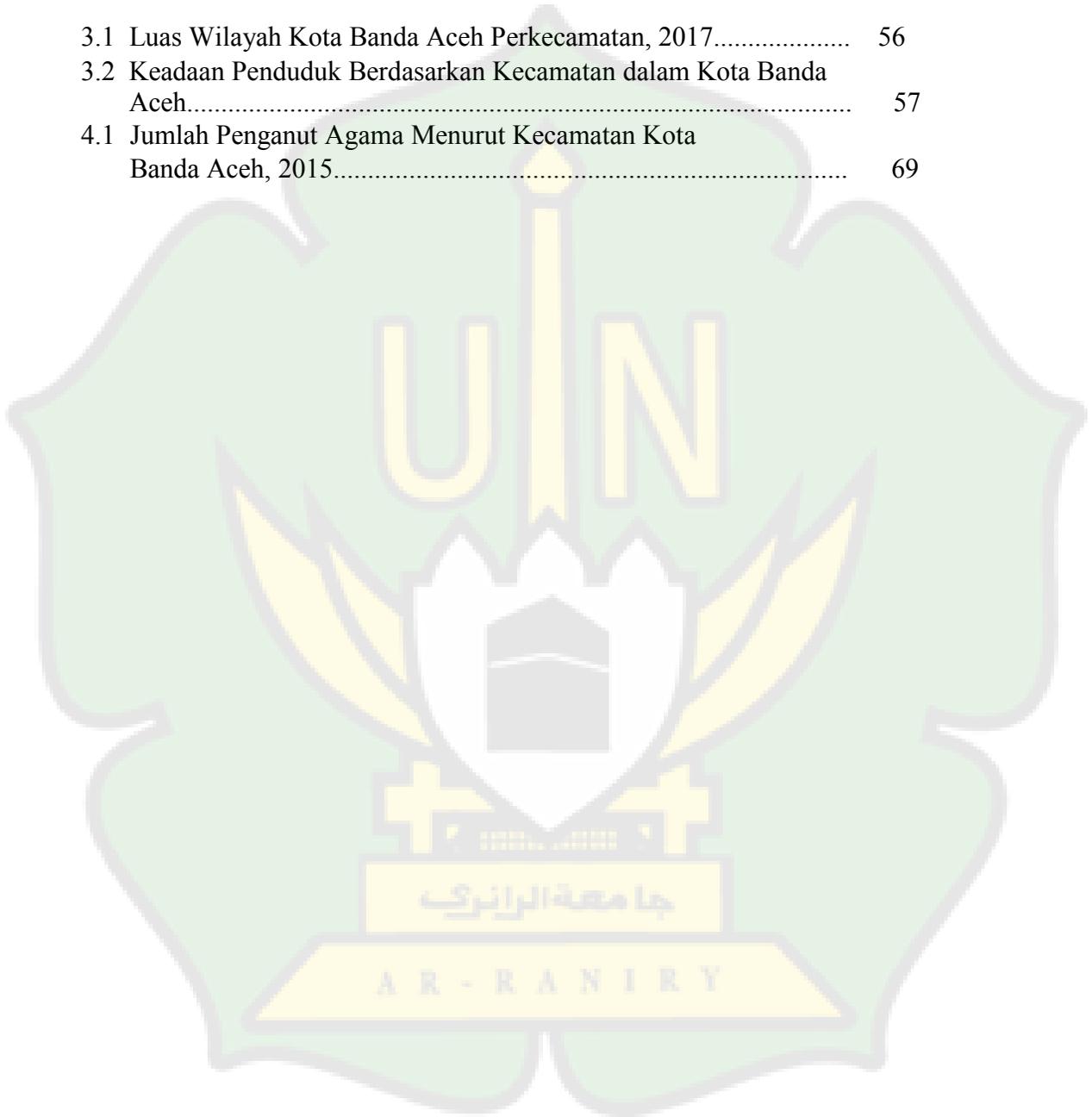
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Landasan Teori	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II RADIKALISME DALAM TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Radikalisme	17
B. Radikalisme, Fundamentalisme dan Terorisme	23
C. Radikalisme dalam Islam	30
D. Gerakan Radikalisme di Dunia Barat	33
E. Radikalisme di Indonesia	36
F. Perkembangan Radikalisme di Aceh	39
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis Kota Banda Aceh	55
B. Wilayah Administratif Kota Banda Aceh.....	56
C. Keadaan Demografis Kota Banda Aceh	56
D. Profesi Penduduk Kota Banda Aceh	58
BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TENTANG RADIKALISME AGAMA	
A. Perkembangan Islam di Aceh	60
B. Tokoh Agama Islam di Aceh	68
C. Pemahaman Mengenai Radikalisme Agama	72
D. Faktor Penyebab Terjadinya Radikalisme Agama.....	79

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2017.....	56
3.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.....	57
4.1 Jumlah Penganut Agama Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh, 2015.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

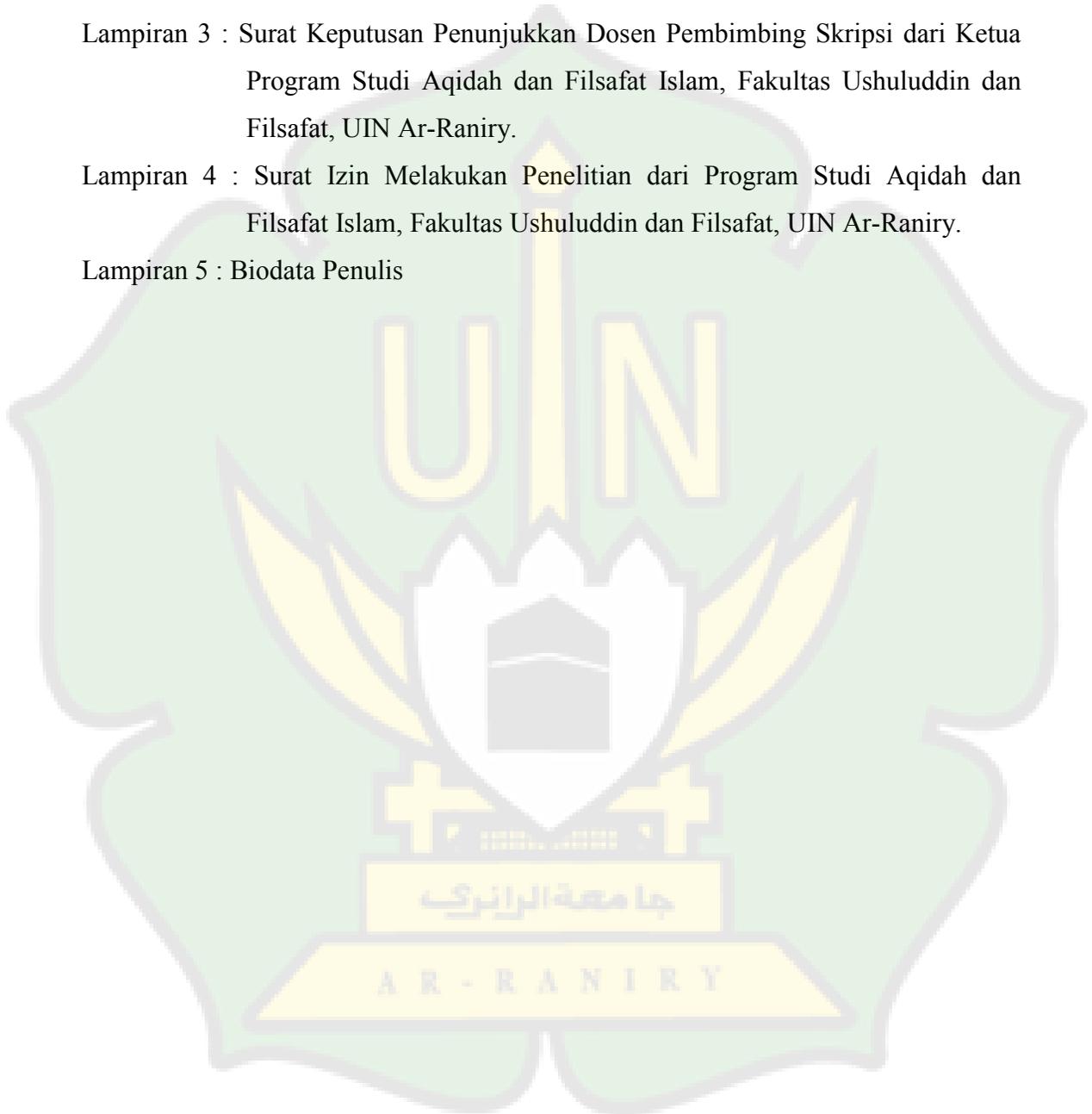
Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 : Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry.

Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry.

Lampiran 5 : Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah radikalisme,¹ kelompok radikal dan gerakan radikal akhir-akhir ini seringkali muncul dalam berbagai media, baik media cetak, elektronik maupun media online. Istilah ini sering dihubungkan dengan agama sehingga memunculkan istilah baru yaitu radikalisme agama atau ajaran dan tindakan radikal berbasis pada agama.

Dalam Islam, gerakan radikal pernah muncul pada masa awal dalam bentuk gerakan kaum *Khawarij*.² Aliran ini merupakan aliran politik pertama dalam Islam. Keterkaitan politik dengan gerakan dan paham radikal kaum Khawarij, menunjukkan bahwa politik merupakan salah satu faktor yang dapat memunculkan radikalisme dalam Islam. Di sisi lain, harus diakui terjadinya berbagai tindakan kekerasan (*radikalisme*) tidak terlepas dari stabilitas politik dan tingginya rasa keadilan sosial di tengah masyarakat Indonesia misalnya, yang saat ini situasi stabilitas politiknya belum begitu “mapan” serta maraknya tindakan diskriminatif, baik ekonomi, maupun

¹ Radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu; *pertama*, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. *Kedua*, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan merasa orang lain salah. *Ketiga*, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan. *Keempat*, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Lihat Alhairi, “Pendidikan Anti Radikalisme: Ikhtiar Memangkas Gerakan Radikal”, dalam *Jurnal Tarbawi*, Vol. 14. No. 2, (2017), 112.

² Mereka pada mulanya adalah para pendukung Ali bin Abi Thalib yang tidak menyetujui dilaksanakannya *tahkim*. Mereka yang berjumlah dua belas ribu orang tersebut berkumpul di desa Harura dan mengangkat Abdullah Ibn Wahb Al-Rasidi menjadi Imam mereka dan menyatakan keluar dari barisan Ali ibn Abi Thalib. Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), 11.

hukum yang sesungguhnya merupakan pangkal merebaknya radikalisme.³ Tindakan radikal tersebut muncul karena masyarakat sudah lelah dengan penganaktirian yang dilakukan oleh para penguasa di masa lalu, di mana penguasa bagaikan seorang dewa yang “*ma’sum*” yang tidak pernah bersalah. Kesalahan semuanya adalah milik rakyat. Akibatnya muncul rasa kebencian terhadap pemerintah yang sudah mengakumulasi hingga pada akhirnya meledak yang berubah menjadi tindakan bersifat radikal.⁴

Begitu juga dengan penegakan hukum yang seakan-akan hanya menjadi bagian dari rakyat kecil, sedangkan pemerintah seakan memiliki kekebalan terhadap hukum. Hukum tidak lagi memainkan perannya atau dengan kata lain supremasi hukum telah dikangkangi oleh para penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks ini banyak pengamat yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Menurut Afif Muhammad, sebagaimana dikutip Idrus Ruslan, ketidakpastian hukum tidak saja terjadi dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan yang diaktualisasikan oleh sebagian kaum Muslim, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan keamanan. Berbagai kasus penyelewengan dan korupsi tidak diselesaikan secara tuntas, bahkan beberapa pengusaha kelas kakap yang diduga terlibat korupsi justru dibebaskan. Sementara itu, seseorang yang melaporkan adanya korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang hakim justru menjadi terdakwa. Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.⁵

³ Idrus Ruslan, “*Islam dan Radikalisme: Upaya Antisipasi dan Penanggulangannya*”, dalam *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 2, (2015), 223.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Secara umum bangkitnya gerakan Islam di Indonesia didorong oleh faktor yang berasal dari dalam Islam yakni sentimen keagamaan atau lebih tepat dikatakan sebagai emosi keagamaan dan juga dari luar Islam yaitu instabilitas politik, masalah penegakan hukum dan kesenjangan sosial yang berwujud dalam berbagai macam bentuk. Namun penyebab utama dari radikalisme ini adalah faktor politik, walaupun pada akhirnya merembas kedalam berbagai faktor lain.

Beberapa kasus aksi radikal yang pernah terjadi di Indonesia adalah aksi terorisme Serangan Jakarta 2016 yang merupakan serentetan peristiwa berupa ledakan dan penembakan di sekitar Plaza Sarinah pada tanggal 14 Januari 2016 yang dilakukan oleh salah satu alumni kamp Jalin, yakni kamp sejenis “pelatihan teror” di Aceh Besar.⁶ Aksi lainnya bom Bali I pada 12 Oktober 2002 dan Bom JW Marriot pada 5 Agustus 2003.⁷ Dan masih sangat banyak kasus-kasus radikal lain yang berlandaskan agama di Indonesia, seperti penyerangan teror terhadap para ulama yang sedang marak diberitakan diberbagai stasiun televisi Indonesia dalam beberapa tahun ini.

Dampak ajaran dan aksi radikal di Indonesia terutama dalam pergerakan terorisme sangat terpengaruh dengan adanya berbagai peristiwa teror yang dilakukan oleh warga Indonesia sendiri, dengan mengatasnamakan agama dan Islam. Seperti yang dikatakan oleh Yusny Saby, dalam Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, “Islam adalah solusi, baik dalam hidup pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Sangat disayangkan, dengan perilaku segelintir orang (yang kebetulan beragama

⁶ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Memahami Potensi Radikalisme dan Terorisme di Aceh* (Banda Aceh: Bamdar Publishing, 2016), xi.

⁷ *Ibid*, 48.

Islam, atau punya nama yang mirip Arab atau muslim), sehingga muncul kesan dalam arena global, bahwa ada “Muslim” yang bermasalah.”⁸

Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang signifikan, baik dalam segi instabilitas nasional sebagai akibat dari lahirnya gerakan-gerakan terorisme dan radikalisme yang memberikan dampak bagi keberlangsungan sosial, maupun dalam segi ekonomi dan budaya dalam masyarakat. Problem utama yang timbul akibat dari kejahatan teroris adalah kekacauan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Dalam kondisi saat ini, gejala radikalisme agama tidak pernah berhenti dalam rentang perjalanan sejarah umat Islam hingga sekarang. Bahkan, wacana tentang hubungan agama dan radikalisme belakangan semakin menguat seiring dengan munculnya berbagai tindakan kekerasan dan lahirnya gerakan-gerakan radikal, khususnya pasca peristiwa 9 September 2001 di New York, Washington, dan Philadelphia, yang kemudian disusul dengan pengeboman di Bali (12/10/2002 dan 1/10/2005), Madrid (11/3/2004), London (7/7/2005), dan terakhir di Paris (13/10/2015). Artinya bahwa kejahatan terorisme dapat terjadi dalam komunitas masyarakat manapun dan diawali dengan berkembangnya paham radikal dalam masyarakat, sehingga dapat meresahkan.⁹

Dampak paling nyata dari terjadinya radikalisme adalah terbentuknya politisasi di dalam agama, di mana agama memang sangat sensitif sifatnya, paling mudah membakar fanatisme, menjadi kipas paling kencang untuk melakukan berbagai tindakan yang sangat keras, baik di dalam kehidupan sosial antar individu

⁸ *Ibid*, x.

⁹ Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin, “Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme”, dalam *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 03, No. 01* (2017), 77-78.

maupun kelompok, sehingga terbentuklah apa yang dinamakan kelompok Islam radikal.¹⁰

Deradikalisasi bukanlah hal baru bagi Indonesia. Dalam konteks gerakan Islam radikal, deradikalisasi terhadap eks kader Negara Islam Indonesia (NII) atau lebih dikenal dengan nama Darul Islam atau DI, Komando Jihad, Mujahidin Kanyamaya, Laskar Jihad, dan lain-lain, merupakan contoh dan pembelajaran bagi kinerja deradikalisasi yang saat ini gencar dilakukan. Deradikalisme merupakan upaya mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menyasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran. Tujuan utama dari deradikalisasi, bukan hanya mengikis radikalisme, memberantas potensi terorisme tapi yang utama adalah mengokohkan keyakinan masyarakat bahwa terorisme memberikan dampak yang buruk bagi stabilitas nasional bahkan dapat memberikan citra Negara yang buruk bagi dunia Internasional.¹¹

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan untuk melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup.¹²

Rangkaian kasus terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban,

¹⁰ *Ibid*, 79.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, 81.

ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya dukungan dari tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Dengan adanya upaya tersebut, maka meminimalisir celah-celah terorisme.¹³

Dalam penanganan radikalisme dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yakni Peran Pemerintah; Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan; dan Peran Masyarakat Sipil. Secara umum, kebijakan pemerintah mengenai pengurangan kekerasan sudah terlihat dari adanya keberadaan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai organ pemerintah yang fokus kepada penanganan teroris yang mana adalah sebagai alat negara yang harus menangkal kejahatan teroris dan penyebaran paham radikal.

Selain itu, Institusi keagamaan seperti pesantren dan sekolah-sekolah agama juga bisa berperan dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan melalui

¹³ *Ibid.*

pemberian materi pembelajaran agama yang mengutamakan gagasan-gagasan Islam yang *rahmatal lil alamin* dan toleran. Oleh karena itu, peran dunia pendidikan diperlukan dalam membangun pemahaman di masyarakat, sehingga tidak salah dalam memberikan pemahaman keagamaan.¹⁴

Selain pemerintah, ulama juga turut menanggapi ajaran dan aksi radikal di Indonesia, salah satunya yaitu ulama turut memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait isu radikalisme agar umat Islam bisa menjalankan ajaran agama sesuai aqidah dan syari'ah Islam, serta berakhlaqul karimah sesuai contoh Rasulullah Saw dalam berbagai momentum dakwah dan syi'ar Islam. Para ulama tersebut juga tampil menjelaskan kepada umat ini tentang aqidah *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, sekaligus juga membantah para *ahlul bid'ah* dan para penyimpang agama. Mereka membersihkan aqidah umat ini dari berbagai macam syirik, *bid'ah* dan penyimpangan. Mereka memperingatkan umat ini agar menjauh dari *ahlul bid'ah* dan majelis-majelis mereka.¹⁵ Dengan gencar para ulama *mentahdzir* umat dari bahaya-bahaya mereka melalui berbagai media dan sarana, baik ceramah, diskusi, tulisan, kitab-kitab, internet, dan lain-lain agar terbongkar segala kebatilan para *ahlul bid'ah*.¹⁶

Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti topik ini karena semakin berkembangnya zaman serta majunya teknologi, kasus radikalisme semakin tinggi, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun agama. Bahkan kasus radikal berlandaskan

¹⁴ *Ibid*, 83-85.

¹⁵ Al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba'abduh, *Sebuah Tinjauan Syari'at: Mereka Adalah Teroris* (Malang: Pustaka Qaulan Sadida, 2005), 115.

¹⁶ *Ibid*, 119.

agama lebih tinggi dibandingkan lainnya, karena agama merupakan suatu hal yang sangat sensitif dimata penganutnya.

B. Rumusan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan mengenai radikalisme agama, maka dalam penulisan ini, penulis membatasi penulisan hanya pada:

1. Bagaimana pemahaman tokoh agama Islam Kota Banda Aceh tentang ajaran dan gerakan radikalisme agama?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi radikalisme agama menurut pendapat tokoh agama tersebut?
3. Bagaimana respon tokoh agama Islam Kota Banda Aceh dalam menyikapi berkembangnya radikalisme agama di Aceh secara khusus dan di Indonesia secara umum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemahaman tokoh agama Islam di Kota Banda Aceh tentang ajaran dan gerakan radikalisme agama.
2. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman para tokoh agama tersebut tentang radikalisme agama.
3. Mengetahui respon mereka dalam menyikapi berkembangnya radikalisme agama di Aceh secara khusus dan di Indonesia secara umum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum adalah dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi peneliti sendiri juga kepada peneliti lainnya.

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap kajian keagamaan di masyarakat, serta dapat dijadikan referensi oleh pihak sekolah, dinas terkait, masyarakat umum dan dapat menambah khazanah keilmuan di perguruan tinggi, mudah-mudahan juga dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi mahasiswa/mahasiswi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat khususnya program studi Aqidah dan Filsafat Islam.

Kepada peneliti selanjutnya, supaya dapat menyempurnakan tulisan ini, karena keterbatasan ilmu penulis sehingga tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan.

E. Kajian Pustaka

Dalam hal mengkaji tentang radikalisme agama dalam pandangan tokoh agama, peneliti mencoba melihat lebih jauh tentang konsep radikalisme dalam berbagai sumber. Berkaitan dengan permasalahan Radikalisme, beberapa tulisan dan penelitian terdahulu diantaranya antara lain:

1. Buku *Memahami Potensi Radikalisme dan Terorisme di Aceh* yang disusun oleh Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. Buku ini menjelaskan pemahaman, potensi, dan isu tentang radikalisme dan terorisme di Aceh, pemaparan di dalam buku ini dapat memberikan gambaran mengenai ajaran dan karakteristik kaum terorisme.
2. Dalam buku *Radikalisme Agama di Indonesia* yang disusun oleh Sunyoto Usman menjelaskan respon Islam atas globalisasi dan radikalisme, juga kondisi sosial yang dipengaruhi oleh akar-akar radikalisme. Hingga radikalisasi terhadap Syi'ah di Indonesia, buku ini menjelaskan secara

terperinci mengenai persoalan-persoalan radikalisme. Buku ini juga melanjutkan kajian-kajian sebelumnya mengenai gerakan sosial di Indonesia, baik di masa pasca-kolonial, Orde Lama, Orde Baru, maupun masa Reformasi sekarang ini.

3. Buku *Islam Garis Keras* yang merupakan terjemahan dari *Islamic Fundamentalism* yang ditulis oleh Youssef M. Choueriri adalah sebuah buku yang mengupas karakteristik-karakteristik umum mengenai Revivalisme Islam, juga kemunculan awal Radikalisme Islam.
4. Buku *Radikalisme dan Terorisme* disusun oleh Achmad Jainuri mengupas makna, sejarah, dan gerakan radikalisme, serta akar ideologi gerakan radikal Islam. Buku ini juga menegaskan bahwa fenomena radikalisme dan terorisme sebagai gerakan aksinya tidaklah terbentuk oleh satu sebab tunggal yang lahir dari pemahaman agama yang eksklusif, akan tetapi terbentuk oleh berbagai macam sebab yang saling terkait.
5. Skripsi oleh Saifuddin (2011) dengan judul penelitian “*Radikalisme Islam Di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang anggapan bahwa kelompok Islam militan diikuti oleh kalangan awam mulai disadari kalangan fundamentalis. Pilihan kelompok mahasiswa sebagai agen baru dianggap mampu merubah pola gerakan. Merebaknya kelompok radikal Islam di kalangan mahasiswa tidak terlepas dari upaya kaderisasi kelompok intelektual kalangan fundamentalis Islam. Strategi yang dilakukan adalah indokrinasi ideologis yang membuat

mahasiswa sulit berpisah dari kelompok ini. Fenomena ini akhirnya membentuk metamorfosa baru gerakan Islam radikal di kampus.

6. Penelitian oleh Devi Aryani (2015) dengan judul penelitian “*Fenomena Radikalisme Gerakan ISIS Di Indonesia (Analisis Isi Terhadap Berita Pada Media Online mengenai Gerakan ISIS di Indonesia)*” Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan isi berita fenomena Radikalisme Gerakan ISIS di Indonesia pada media online yang dimuat pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.
7. Penelitian oleh Abu Rokhmad (2012) dengan judul penelitian “*Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*” Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penelitian ini membahas tentang elemen-elemen radikalisme Islam dalam pembelajaran PAI (pendidikan agama Islam) serta strategi deradikalisasi Islam oleh para guru dalam pembelajaran PAI di SMU (Sekolah Menengah Umum).

F. Landasan Teori

Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama. Dalam perspektif al-Qur’an ulama dilihat sebagai bagian dari umat yang memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan masyarakat. Para tokoh agama juga dapat dikatakan sebagai kaum intelektual yang memiliki komitmen pada terciptanya pembaharuan dan reformasi yang terus menerus dalam masyarakat muslim dan menunjukkan perpaduan yang menarik antara peran lama kyai dalam

masyarakat muslim.¹⁷ Jadi tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, dalam hal ini ialah tokoh agama Islam yang dikenal dengan sebutan para kyai, ustazd, teungku atau ulama. Keberadaan tokoh agama di masyarakat sering kali lebih didengar perkataan-perkataannya dari pada pemimpin-pemimpin yang lain.

Kelebihan pengetahuan agama yang dimiliki oleh para tokoh agama tentu membuat mereka lebih kritis dalam menerima berbagai paham yang memasuki kehidupan masyarakat, termasuk konsep radikalisme. Hal ini radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.¹⁸ Dalam agama radikalisme adalah sikap berlebihan yang seseorang miliki dalam beragama, ketidaksesuaian antara akidah dengan prilaku, antara yang seharusnya dengan realitas, antara agama dengan politik, antara ucapan dengan tindakan, antara yang diangankan dengan yang dilaksanakan, serta antara hukum yang di syaratkan oleh Allah dengan produk hukum manusia itu sendiri.¹⁹

¹⁷ Khusnul, Peran Tokoh Agama Dalam Pengembangan Sosial Agama di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21), *Laporan Penelitian*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), 15-16.

¹⁸ Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), 38.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Terj. Hamin Murtadho (Solo: Era Intermedia, 2014), 127.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Adapun langkah-langkah pengumpulan responden narasumber dan data dilakukan peneliti dengan cara sebagai berikut:

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengadaan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilaksanakan dengan cara datang langsung ke objek penelitian, untuk menggali dan memperoleh data serta informasi terkait dengan pandangan tokoh agama terhadap ajaran, kelompok dan gerakan radikal berbasis agama di Aceh, Indonesia dan berbagai belahan dunia.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data dilakukan melalui wawancara langsung terhadap tokoh agama Islam yang ada di kota Banda Aceh. Adapun peneliti memilih daerah penelitian karena daerah tersebut merupakan ibukota dari Provinsi Aceh, dimana segala bentuk aktivitas/ kegiatan Pemerintah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan berbagai akademisi lain berpusat di kota tersebut, sehingga kota Banda Aceh menjadi salah satu daerah yang sangat berpengaruh di Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Atau dengan kata lain wawancara

merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Terdapat dua jenis wawancara yang lazim digunakan, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan kedua jenis wawancara, pertama-tama peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan untuk memulai wawancara, kemudian jika ada informasi tambahan dari narasumber, maka peneliti akan memberi tambahan pertanyaan yang sesuai dengan kondisi pada saat wawancara, sehingga menjadi fleksibel dan sesuai dengan jenis permasalahannya.

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai obyek yang diamati. dalam hal ini peneliti mengamati data penduduk pada Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah ada. Metode ini dilakukan dengan cara melihat berbagai dokumen resmi seperti gambar, catatan, serta berita dari kasus-kasus yang telah terdata.

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melihat data-data kasus aksi radikal yang dimiliki oleh berbagai sumber, baik dari ormas subjek penelitian maupun pihak kepolisian.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Terdapat tiga komponen pokok dalam analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan disusun berdasarkan bab per bab, hal ini dilakukan untuk memudahkan pembahasan. Perinciannya sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan gambaran umum penelitian mengenai apa itu radikal, radikalisme, radikalisasi, fundamentalisme dan terorisme serta isu konflik radikalisme, kasus radikalisme yang ada di Barat dan di Indonesia, serta perkembangan radikalisme di Aceh.

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 83.

Bab ketiga berisikan penjelasan tentang gambaran umum lokasi penelitian mengenai letak geografis, wilayah administratif, keadaan demografis serta profesi penduduk Kota Banda Aceh.

Bab keempat membahas perkembangan Islam di Aceh, tokoh agama, dan menguraikan serta menjelaskan tentang hasil penelitian pemahaman tokoh agama, faktor terjadinya radikalisme agama, serta respon tokoh agama terhadap isu radikalisme agama.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan penguraian tentang kesimpulan hasil penelitian dan keseluruhan pembahasan serta saran-saran yang mungkin berguna untuk semua pihak.



BAB II

RADIKALISME DALAM TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Radikalisme

Radikal adalah sebuah perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat mendasar sampai ke akar-akarnya. Sikap yang radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya.¹ Dalam bahasa Latin istilah *radikal* berasal dari kata *radix* yang artinya *akar*. Dalam kamus ilmiah populer juga disebutkan bahwa radikal adalah sikap yang menyeluruh, keras, serta maju dan tajam (dalam berfikir).²

Makna kata *radix* (akar) tersebut dapat diperluas kembali, yang berarti pegangan yang kuat, keyakinan, pencipta perdamaian dan ketentraman, dan makna-makna lainnya. Kata ini dapat dikembangkan menjadi kata radikal, yang berarti lebih adjektif. Sehingga dapat dipahami, bahwa orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman secara lebih detail dan mendalam, layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya, hal inilah yang menimbulkan kesan menyimpang di masyarakat. Setelah itu, penambahan sufiks *-isme* sendiri memberikan makna tentang pandangan hidup (paradigma), sebuah faham, dan keyakinan atau ajaran. Penggunaannya juga sering dikaitkan dengan suatu aliran atau kepercayaan tertentu.³

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), 11.

² Mangunsuwito, *Kamus Saku Ilmiah Populer* (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011), 393.

³ A Faiz Yunus, "Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam", dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an Vol. 13, No. 01* (2017), 81.

Dapat dilihat bahwa sebenarnya istilah radikal tidak hanya identik dengan hal negatif tetapi juga hal positif yang menunjukkan kepada sesuatu yang sifatnya berpegang teguh pada prinsip. Ketua umum Dewan Masjid Indonesia, Tarmidzi Taher memberikan komentarnya tentang radikalisme bermakna positif, yang memiliki makna *tajdid* (pembaharuan) dan *islah* (perbaikan), suatu *spirit* perubahan menuju kebaikan. Hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara para pemikir radikal sebagai seorang pendukung reformasi jangka panjang.⁴

Sebuah istilah yang netral dapat berubah konotasi menjadi negatif jika istilah tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Sebenarnya radikal merupakan istilah yang positif yang menunjukan seseorang yang berpendirian teguh pada prinsip. Contohnya muslim radikal, banyak yang menganggap muslim radikal itu senang dengan perang dan kekerasan, padahal yang dimaksud adalah berpegang teguh pada ajaran agama yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang penuh kedamaian.

Istilah radikal juga menjadi salah satu unsur pokok dalam filsafat sebagai mana yang didefinisikan oleh para tokoh filsafat, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah pembahasan tentang segala yang ada secara radikal, rasional, sistematis, bebas, kritis, dan universal. Salah satu tokoh yang mendefinisikannya adalah Fuad Hassan, berpendapat bahwa filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal; radikal dalam arti mulai dari *radix*-nya sesuatu gejala, dari akarnya sesuatu yang hendak dipermasalahkan.⁵

Dalam dunia politik istilah radikal sering diartikan sebagai sikap yang keras untuk menuntut perubahan dalam sistem pemerintahan maupun perubahan aturan

⁴ *Ibid.*

⁵ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 9-10.

atau undang undang. Misalnya seseorang politisi yang sangat menentang suatu kebijakan pemerintah yang artinya dalam setiap komentar atau usulannya ia menolak kebijakan pemerintah tersebut. Dalam hal ini politisi tersebut dapat dikatakan radikal.

Sedangkan radikalisme, menurut kamus Webster adalah kualitas atau pernyataan atau prinsip atau doktrin politik atau perubahan sosial yang mengakar. Secara terminologis, radikalisme merupakan aliran atau paham radikal terhadap tatanan politik; paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara secara keras.⁶ Radikalisme juga diartikan sebagai orientasi politik kelompok yang menghendaki perubahan pemerintahan dan masyarakat secara revolusioner.

Secara sosiologis, radikalisme kerap kali muncul apabila terjadi banyak kontradiksi dalam tata sosial yang ada. Bila masyarakat mengalami anomali atau masyarakat tidak mempunyai daya lagi untuk mengatasi kesenjangan itu, maka radikalisme dapat muncul ke permukaan, dengan kata lain akan timbul proses radikalisme dalam lapisan-lapisan masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Harun Nasution menyatakan bahwa, radikalisme adalah suatu gerakan yang memiliki pandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinannya.⁷ Sartono Kartodirdjo juga mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan

⁶ Syarifuddin, *Agama, Konflik dan Kerukunan: Solusi Mencapai Dialog Menuju Jalan Damai* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2014), 66.

⁷ Syarifuddin, *Agama, Konflik dan Kerukunan....*, 67.

ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.⁸

Radikal sebagai paham (isme) dapat tumbuh secara demokratis, kekuatan (*force*) masyarakat dan teror. Dengan kata lain, radikalisme adalah sikap radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Oleh karenanya, setiap orang berpotensi menjadi radikal dan penganut radikal (radikalisme) tergantung apakah lingkungan (*habitus*) mendukungnya atau tidak.

Radikalisme pada dasarnya berakar dari eksklusivitas suatu kelompok, dalam arti tertentu bahkan berdekatan dengan paham primordialisme. Demikian juga agama tidak luput dari ideologi ini, bahkan agama dapat ditunggangnya. Padahal sebenarnya aksentuasi makna agama secara *de facto* berkiblat pada yang Mutlak, yang merupakan kiblat dari semua pengetahuan. Pemimpin agama seharusnya mampu mengatasi persoalan ini, tetapi sebenarnya hal ini juga sebagai antinomi yang harus ada yang membuat agama tetap lestari. Jika suatu agama terlalu liberal maka kemungkinan agama akan jatuh dalam sekularisasi, dan jika suatu agama terlalu radikal ada kemungkinan agama akan jatuh dalam konservatisme.⁹

Ahmad Asrori dalam *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam IAIN Raden Intan Lampung* menyatakan radikalisme agama berarti perilaku keagamaan yang menyalahi syariat, yang mengambil karakter keras sekali antara dua pihak yang bertikai, yang mana bertujuan merealisasikan target-target tertentu, atau bertujuan untuk merubah situasi sosial tertentu dengan cara yang menyalahi aturan agama.¹⁰

⁸ Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), 38.

⁹ *Ibid*, 68.

¹⁰ Ahmad Asrori, "Radikalisme di Indonesia: antara Historisitas dan Antropisitas", dalam *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam IAIN Raden Intan Lampung Vol. 09, No. 02 (2015)*, 258.

Dari konteks tersebut dapat dipahami bahwa radikalisme agama adalah perilaku keagamaan yang menghendaki perubahan secara drastis dengan mengambil karakter keras yang bertujuan untuk merealisasikan target-target tertentu.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, mengatakan bahwa radikalisme adalah sikap berlebihan yang seseorang miliki dalam beragama, ketidaksesuaian antara akidah dengan perilaku, antara yang seharusnya dengan realitas, antara agama dengan politik, antara ucapan dengan tindakan, antara yang diangankan dengan yang dilaksanakan, serta antara hukum yang di syaratkan oleh Allah dengan produk hukum manusia itu sendiri.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu membedakan antara radikal, radikalisme dan radikalisasi. Menurut Hasyim Muzadi, sebagaimana dikutip oleh Abu Rokhmad, pada dasarnya seseorang yang berpikir radikal, maksudnya yang berpikir secara mendalam, sampai ke akar-akarnya, boleh-boleh saja dan memang berpikir seharusnya demikian. Misalnya, orang sah-sah saja berpikir dan berpandangan dalam hatinya bahwa Indonesia banyak mengalami masalah ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, budaya, dan politik. Hal ini disebabkan Indonesia tidak menerapkan syari'at Islam. Demikian juga sah-sah saja jika orang tersebut berharap negara Indonesia sistemnya harus diganti dengan segera dengan sistem pemerintahan Islam. Oleh karenanya, sekeras apapun pernyataan tersebut, jika hanya berbentuk sebuah wacana atau sebuah pemikiran, tentunya tidak akan menjadi persoalan publik. Sebab pada hakikatnya, apa saja yang muncul dalam benak atau pikiran tidak dapat

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Terj. Hamin Murtadho (Solo: Era Intermedia, 2014), 127.

diadili (kriminalisasi pikiran) karena tidak dapat digolongkan dalam tindak pidana. Kejahatan adalah berupa suatu tindakan (*omissi*) atau segala sesuatu yang berdasarkan pemikiran. Namun, apabila kemudian pemikiran tersebut dicoba untuk dilaksanakan atau diterapkan, maka pada sisi ini sudah dapat dikatakan menjadi suatu tindakan pidana.¹²

Sementara yang dimaksud radikalisasi adalah seorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan lainnya. Oleh karena itu, ketika teroris sudah ditangkap, belum tentu radikalisme akan turut hilang. Sepanjang sejarah keadilan dan kemakmuran belum terwujud, radikalisasi akan selalu muncul di masyarakat. Keadilan itu menyangkut banyak aspek, baik aspek hukum, politik, pendidikan, sosial, budaya, hak asasi, dan lain-lain. Hukum itu berbeda dengan keadilan, hukum adalah aspek tertentu, sedangkan keadilan merupakan akhlak dari hukum tersebut.¹³

Oleh karenanya, potensi berpikir, bersikap dan bertindak radikal, berideologi radikal (radikalisme) dan tumbuh reaktif menjadi radikal (radikalisme) adalah merupakan modal awal seseorang menjadi pelaku teror (teroris) atau orang yang berpaham teror (terorisme). Tidak ada teror tanpa radikalisme. Sebaliknya penganut radikalisme belum tentu menyukai jalan kekerasan (teror). Sekalipun demikian, terdapat kesamaan bahasa yang digunakan oleh radikalisme maupun terorisme, yaitu berupa bahasa militan atau bahasa perjuangan (*language of militance*).¹⁴

¹² *Ibid*, 69.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.

Peneliti melihat ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat tersebut menjadi penyebab utama munculnya gerakan radikal, masyarakat gusar dan kemudian muncul benih-benih radikal yang pada akhirnya mengkritik pemerintah, memberontak dan menuntut perubahan dalam pemerintahan. Selain ketidakadilan tersebut, sikap intoleransi antar sesama umat beragama pun menjadi pemicu tumbuhnya sikap radikal dalam masyarakat, dewasa ini masyarakat semakin anti sosial dan tidak saling menjaga perdamaian sehingga banyak terjadi pembantaian, pengusiran dari wilayah tempat tinggal, di berbagai belahan dunia.

B. Radikalisme, Fundamentalisme dan Terorisme

Dalam sejarah umat manusia, termasuk umat Muslim, radikalisme selalu muncul dalam pemikiran maupun gerakan. Radikalisme pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya paling benar dan menganggap yang lain salah. Sementara radikalisme tindakan atau gerakan ditandai oleh aksi ekstrem yang harus dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan. Dalam politik, contoh gerakan yang dikategorikan radikal adalah tindakan makar, revolusi, demonstrasi dan protes sosial yang anarkis, serta berbagai kekerasan yang merusak.¹⁵

Berbicara mengenai radikalisme, dapat dipahami bahwa radikalisme adalah sebuah paham didasarkan pada tindakan dan gerakan ekstrem yang harus dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan. Dalam politik, radikalisme adalah orientasi politik yang cenderung melakukan perubahan melalui revolusi.

¹⁵ Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 4-5.

Contoh gerakan yang dikategorikan radikal adalah tindakan makar, demonstrasi, dan protes sosial yang anarkis, serta berbagai aksi kekerasan yang merusak.¹⁶

Sedangkan terorisme, secara etimologi berasal dari kata “*to Terror*” dalam Bahasa Inggris. Sementara dalam Bahasa Latin disebut *Terrere* yang berarti “gemetar” atau menggetarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia teror merupakan suatu usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu.¹⁷

Terorisme dalam pengertian perang memiliki definisi sebagai serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror (takut), sekaligus menimbulkan korban *massif* bagi warga sipil dengan melakukan pengeboman atau bom bunuh diri.¹⁸

Beberapa kasus pengeboman, terorisme dan lain sebagainya merupakan akibat daripada paham radikal yang telah meningkat menjadi sebuah tindakan yang sangat merugikan banyak pihak, bahkan banyak orang yang tidak bersalah terkena imbasnya. Radikalisme apabila dibiarkan akan membawa dampak negatif yang lebih besar terutama bagi kehidupan beragama, sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlunya diadakan beberapa penanganan dari semua aparaturnegara, yaitu, rakyat, tokoh agama, serta penegak hukum juga diadakan deradikalisasi. sehingga dalam pemahaman agama diajarkan keterampilan pemecahan masalah tanpa kekerasan,

¹⁶ Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 5.

¹⁷ A Faiz Yunus, “*Radikalisme, Liberalisme.....*”, 82.

¹⁸ *Ibid.*

mampu berfikir kritis, toleransi, dan pemahaman agama secara integratif tidak menimbulkan bias.¹⁹

Dalam wacana Islam, banyak orang mengaitkan ideologi radikalisme dengan doktrin jihad, yang dalam Kristen disamakan dengan perang salib. Pemaknaan jihad sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok garis keras dalam komunitas Muslim menjadi kecenderungan yang umum di kalangan para orientalis Barat dalam mengaitkan terorisme dengan konsep jihad. Kelompok garis keras ini menjebakkan diri dalam memahami konsep jihad, yang hanya mendasarkan pada keterbatasan kemampuan subjektif dan kepentingan. Jadi sebenarnya, antara kelompok garis keras Muslim dan kaum orientalis memiliki pemahaman yang sama tentang jihad.²⁰

Dalam kajian ideologi, radikalisme memiliki dua makna: *pertama*, ideologi kompromis yang berkaitan dengan penerimaan pembangunan, perubahan dan konsep kemajuan. Kelompok yang memiliki orientasi ini disebut kaum radikal kanan. Sedangkan *kedua*, ideologi non-kompromis yang mendasarkan pada nilai-nilai masa lalu, yang tidak mau menerima perubahan, kelompok ini disebut radikal kiri. Dalam politik, radikalisme merupakan orientasi yang cenderung melakukan perubahan melalui revolusi. Dalam kaitan ini, istilah radikalisme merupakan suatu keyakinan akan adanya perubahan dalam masyarakat, dan perubahan ini hanya mungkin terjadi melalui cara revolusi. Dalam istilah lain disebut ekstrem kanan atau ekstrem kiri, lawan dari moderat. Karena itu, dalam pemikiran, radikalisme itu bisa ditemukan pada dua kelompok yang berbeda: kaum modernis maupun tradisional, sekularisme maupun puritanis, liberalis maupun konservatif, dan globalisasi maupun nasionalis.

¹⁹ A Faiz Yunus, "Radikalisme, Liberalisme....", 87.

²⁰ Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme....*, 77 & 86.

Apabila masing-masing tidak saling menerima ide maupun pemikiran satu samalain, di situlah sikap radikal itu muncul. Karena masing-masing biasanya mempertahankan kebenaran pandangan dan pikiran sendiri.²¹

Salah satu dasar ideologi radikalisme adalah fundamentalisme, yang berasal dari gerakan keagamaan Amerika pada awal abad ke-20 oleh kaum Protestan. Dasar gerakan fundamentalisme berakar pada prinsip ajaran yang meliputi : *pertama*, percaya akan ajaran pokok iman Kristen yang pada dasarnya mencakup otoritas Kitab Suci, kelahiran Yesus dari perawan Bunda Maria, kembalinya Yesus secara fisik ke dunia, percaya adanya mukjizat, dan penyaliban Yesus secara fisik sebagai penebus dosa. *Kedua*, kaum fundamentalis adalah mereka yang selalu berupaya menjaga kemurnian ajaran pokok tersebut dari pengaruh ajaran lain dan bersedia mengorbankan diri mereka demi keyakinannya. Atas dasar keyakinan ini kaum fundamentalis dinilai oleh lawannya sebagai kaum yang memiliki sikap keagamaan yang intoleran, eksklusif, ekstrem, fanatik, kaku, literalis, sempit wawasan, reaksioner, dan militan.²²

Namun, saat ini fundamentalisme telah menjadi istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada gerakan revivalisme keagamaan diluar tradisi Protestan, seperti dalam tradisi Islam dan Yahudi, Budhisme, Hindusme, Sikhisme, dan bahkan Konfusianisme. Fundamentalisme telah menjadi slogan politik untuk mendelegitimasi kelompok dan gerakan keagamaan. Sebagai suatu konsep, fundamentalisme menandakan tiga unsur: *pertama*, fenomena keagamaan, *kedua*, penolakan terhadap dunia, sebagai reaksi terhadap perubahan sosial dan kultur yang dipersepsikannya

²¹ *Ibid*, 5-6.

²² *Ibid*, 65.

sebagai kritis, dan *ketiga*, reaksi defensif dengan berupaya mempertahankan tatanan sosial masa lalu yang diidealkan atau diimajinasikan sebagai paling otentik dan benar.²³

Karakteristik paling spektakuler dari fundamentalisme adalah keberhasilannya memobilisasi massa, bukan saja dari segi jumlah tapi juga militansi. Tentu tidak sulit mencari penjelasannya, karena fundamentalisme dapat dipandang sebagai fenomena keberagamaan. Agama merupakan bagian esensial dalam fundamentalisme, dilihat dari sisi kepemimpinannya, ideologi, etos, tujuan dan hubungannya dengan kelompok sosial lain. Dengan sentimen keagamaan, maka setiap gerakan dapat menghasilkan kekuatan dahsyat.²⁴

Sebagai bagian dari masyarakat global yang mengalami modernisasi dan sekularisasi, Indonesia tidak bisa mengelak dari fenomena fundamentalisme. Setidaknya ada dua tugas besar yang menghadang masyarakat ataupun bangsa Indonesia. *Pertama*, jangan sampai fundamentalisme menjadi panglima di negeri ini. Barangkali, tragedi ledakan di Bali yang merenggut nyawa lebih 180 orang cukup menjadi alasan bahwa fundamentalisme harus dibendung. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, fundamentalisme dapat dibendung dengan demokrasi.

Memang, semua ekspresi keagamaan diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang dalam alam demokrasi. Namun, demokrasi memberi ruang yang sama kepada bentuk dan warna keberagaman yang lain, sehingga tidak ada yang memonopoli kebenaran untuk kemudian memaksakan kebenarannya kepada pihak lain. Dengan kata lain, dalam suatu negara demokrasi, segala bentuk ekspresi

²³ Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern* (Jakarta:Erlangga, 2003), 3-4.

²⁴ *Ibid*, 8.

keagamaan memang punya hak untuk berkembang, namun ekspresi keagamaan yang mengancam demokrasi tentu tidak boleh diberi ruang karena Ia adalah musuh demokrasi itu sendiri.

Kedua, menjauhkan fundamentalisme agama dari permainan politik. Sejumlah politisi yang berambisi merebut kekuasaan pada pemilu 2004, berupaya membangun sentimen keagamaan. Hal ini jelas beresiko menggoyahkan fragmentasi masyarakat Indonesia yang sangat plural, dan bahkan justru kontra-produktif dengan cita-cita membangun tatanan kehidupan demokratis yang didasarkan pada pluralisme dan kesetaraan.²⁵

Menurut Muladi dalam bahan seminar *Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus* di Jakarta pada 28 Januari 2004, berpendapat bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*) karena berbagai hal; *pertama*, terorisme merupakan perbuatan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut; *kedua*, target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah; *ketiga*, kemungkinan digunakan senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan baik yang bersifat nasional maupun internasional; *keempat*, dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.²⁶

²⁵ *Ibid*, 9.

²⁶ Aan Aspilhanto dan Fatkhul Muin, "Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme", dalam *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 03, No. 01* (2017), 76.

Istilah teror dan terorisme telah menjadi idiom ilmu sosial yang sangat populer pada dekade 1990-an dan awal 2000-an sebagai bentuk kekerasan atas nama agama. Meskipun sesungguhnya terorisme bukanlah sebuah istilah baru. Tidakan teror telah muncul disepanjang sejarah umat manusia. Bagaimana putra Adam, Qabil menteror Habil, karena yang disebut terakhir ini dinilai menjadi penghambat keinginan Qabil. Beberapa bentuk teror telah menjadi cara yang umum untuk mengintimidasi lawan. Orang percaya bahwa dengan kekerasan bisa mengintimidasi musuh atau lawan untuk menakut nakuti dan kemudian lawan merasa takut atau menyerah, maka biasanya orang tidak ragu menggunakan ancaman yang dimaksud. Dilihat dari jenisnya, ada dua macam terorisme: *state terrorism* dan *non-state terrorism*. Yang *pertama* biasanya menjadi instrumen kebijakan suatu rezim penguasa dan negara, sedang yang *kedua* merupakan bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok orang. Contoh yang lebih umum, yang pertama mewakili penguasa penjajah, sedang yang kedua perlawanan dari rakyat yang terjajah.²⁷

Dewasa ini berita tentang Indonesia berada di halaman depan hampir semua media massa diluar negeri. Sorotan media yang sedemikian menghujam itu terutama disebabkan karena saat ini dunia sedang mengampanyekan aksi bersama untuk memerangi terorisme. Maka, mudah dimengerti mengapa peristiwa bom di Bali begitu cepat menjadi perhatian dunia. Ada isu yang menjadi persoalan pasca kejadian tersebut, yaitu benarkah Indonesia telah menjadi sarang terorisme global.

²⁷ Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme*, 120.

Ditilik dari berbagai segi, Indonesia memang sangat memungkinkan untuk menjadi sarang bagi terorisme. *Pertama*, situasi politik pasca runtuhnya rezim Orde Baru membuka ruang begitu luas untuk berkembangnya radikalisme agama. Hal ini bisa dilihat dari dorongan berbagai kelompok berkepentingan untuk melibatkan agama ke dalam kehidupan publik. Konsekuensinya bukan hanya bisa dilihat dari banyaknya partai-partai politik berbasis agama, tapi juga radikalisasi massa yang “dibodohi” dengan janji-janji surgawi.

Kedua, lemahnya kepemimpinan juga bisa menyebabkan Indonesia terperangkap ke dalam jaringan terorisme global. Langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah pasca tragedi bom Bali akan turut masa depan negeri ini. Jika pemerintah hanya mengutuk sekeras-kerasnya tanpa berhasil menangkap pelakunya dan dibawa ke pengadilan untuk diganjar, maka bisa dipastikan dunia mengisolasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab. Tapi sebaliknya, kaum teroris akan semakin merasa aman menghuni Indonesia karena secara langsung atau tidak mereka merasa terproteksi dari lemahnya kepemimpinan negeri ini.²⁸

C. Radikalisme dalam Islam

Kebangkitan Islam di Indonesia adalah hadirnya gejala-gejala keagamaan yang muncul secara dominan sejak tahun 1980an ditandai oleh menguatnya kecenderungan orang-orang Islam untuk kembali kepada agama Islam dengan mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dikatakan baru karena tidak muncul di tahun 1960an sehingga kebangkitan Islam baru muncul di awal tahun 1980an. Bangkitnya Islam di Indonesia didorong oleh faktor-faktor

²⁸ Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama....*, 10-11.

tertentu yang berasal dari dalam Islam sendiri atau dari luar Islam. Beberapa gerakan Islam menyatakan secara tegas aspek-aspek politik yang ingin dikejar. Sebagian lainnya memilih berusaha untuk menegaskan kembali praktik-praktik keagamaan Islam itu sendiri dari pada mengejar politik.²⁹

Radikalisme Islam merupakan suatu gerakan yang melatarbelakangi gerakan terorisme, dianggap sebagai suatu masalah yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Tindakan-tindakan kelompok radikalisme dapat dipahami, bahwa tidak disebabkan oleh faktor tunggal yang berdiri sendiri, melainkan ada faktor-faktor lainnya yang mengarahkan timbulnya sikap yang demikian, diantaranya faktor sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan serta politik menjadi turut andil dalam mempengaruhi timbulnya radikalisme Islam.³⁰

Radikalisme Islam sering digerakkan oleh pemahaman agama yang sempit, terbatas perasaan, tertekan, terhegemoni, merasa tidak aman secara psikososial, serta ketidakadilan lokal dan global. Menurut Akbar S. Ahmed, salah satu faktor yang mempersubur terhadap pemahaman dan terjadinya radikalisme adalah masalah pendidikan. Bagi Akbar, pendidikan Islam menghadapi problem, pendidikan Islam terlalu sempit dan mendorong tumbuhnya *chauvinisme*³¹ keagamaan.³²

Kemunculan radikalisme Islam, pada dasarnya merupakan sebuah perjuangan untuk melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Dipelopori dan dimotori oleh tokoh yang terdidik secara Barat, perjuangan ini berbelok ke arah aspirasi-aspirasi patriotik,

²⁹ Afadlal,dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 109.

³⁰ Syarifuddin, *Agama, Konflik dan Kerukunan....*, 70-71.

³¹ Chauvinime adalah kesetiaan atau rasa cinta kepada tanah air secara berlebih-lebihan. Lihat, Mangunsuwito, *Kamus Saku Ilmiah Populer* (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011), 100.

³² *Ibid.*

penerapan demokrasi parlementer serta pengadopsian aturan-aturan hukum Eropa.³³ As'ad Said Ali menyebutkan bahwa paling tidak terdapat empat tipologi besar yaitu Kiri-Radikal,³⁴ Kiri-Moderat,³⁵ Kanan-Konservatif,³⁶ dan Kanan-Liberal³⁷ beserta varian-variannya; keempatnya itu bersumber dari pemikiran Barat. Pasca reformasi, muncullah Islamisme yaitu tipologi besar kelima yang menjadi orientasi politik kelompok-kelompok gerakan di Indonesia. Islamisme dapat dikatakan sebagai upaya untuk menegaskan kembali pesan-pesan politik, sosial, dan ekonomi yang diperjuangkan oleh kalangan Islamis, yang diklaim sebagai watak inhern Islam itu sendiri. Islamisme ini merupakan kelompok gerakan Islam *non-mainstream*, bentuk

³³ Youssef M. Choueriri, *Islam Garis Keras: Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme*, Terj. Humaidi Syuhud dan M. Maufur (Yogyakarta: Qonun, 2003), 80.

³⁴ Kiri-Radikal muncul akibat ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi. Karena pada dasarnya sistem demokrasi dengan liberalisasi ekonominya hanya menguntungkan kaum kapitalis. Mereka yang berhaluan dengan ideologi ini menginginkan mobilisasi politik kelompok-kelompok tertindas, khususnya buruh dan petani. Kemunculan wacana ini di Indonesia diarahkan untuk membangun demokrasi yang partisipatoris dan kesetaraan retribusi ekonomi. Kelompok ini bergerak melalui gerakan-gerakan sosial yang mereka bentuk. Front Perjuangan Rakyat misalnya, merupakan kekuatan kelompok sosial yang menyatukan kekuatan proletariat industri dan proletariat agraris. Lihat, As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi: Gerakan-gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis*, (Jakarta, LP3ES, 2012), 25.

³⁵ Terdapat dua jenis ideologi kiri-moderat yang berkembang yaitu, Sosial Demokrasi dan Gerakan Sosial Baru. Sosial demokrasi gagasan pokoknya berupa *welfare state* serta kombinasi antara persamaan sosial dan pasar ekonomi. Sedangkan bentuk pergerakannya, melalui lembaga-lembaga perwakilan kepentingan rakyat. Sedikit berbeda dengan Gerakan Sosial Baru, yang merupakan varian dari sosial demokrasi yang biasa disebut "jalan ketiga". Pandangan ini menginginkan jalan demokrasi yang memungkinkan wakil rakyat tidak diuntungkan dengan adanya sistem kapitalisme. Pergerakan ini muncul untuk mencari jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme dalam sebuah sistem negara. *Ibid*, 27.

³⁶ Kanan-Konservatif merupakan paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan setapak demi setapak, serta menentang perubahan yang radikal. Lihat, Teuku May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Refika Aditama, 1993), 78.

Perlu diketahui bahwa, konservatisme itu sendiri adalah sebuah falsafat ilmu politik yang mendukung nilai tradisional dalam struktur demokrasi. Kelompok ini mengawal jalannya arus reformasi agar nilai-nilai tradisional, seperti Pancasila tidak larut dalam arus liberalisme. (As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi...*, 46.)

³⁷ Kanan-Liberal cenderung berkembang sejalan dengan kapitalisme dan filsafat liberalisme. Dalam filsafatnya, mereka berkeyakinan dengan mengenai pentingnya kebebasan individu untuk mencapai setiap tujuan yang diharapkan. Lihat, As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi...*, 50.

gerakan politik ini dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu jihadis, reformis, dan rejeksionis.³⁸

Jihadis adalah bentuk aksi politik berupa tindakan kekerasan atas nama jihad. Reformis adalah bentuk aksi politik berupa kekerasan terhadap pemerintah tanpa melakukan kekerasan yang akan mengganggu stabilitas nasional dan menuntut hak-hak sektarian. Rejeksionis adalah bentuk aksi politik berupa penolakan terhadap sistem demokrasi dan melakukan tekanan-tekanan terhadap berbagai kebijakan.³⁹

D. Gerakan Radikalisme di Dunia Barat

Ketika orang berbicara masalah radikalisme, maka hal pertama yang tergambar adalah persoalan tersebut masuk dalam domain politik, yaitu bagaimana sesungguhnya radikalisme yang terjadi merupakan bentuk radikalisme negara yang dilakukan oleh perangkat kekuasaan terhadap warga negaranya, atau tindak radikalisme yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang berbeda, atau setidaknya unsur politik diartikan sebagai adanya pihak lain yang ikut campur tangan dalam fenomena radikalisme yang terjadi. Pemahaman ini tidaklah berlebihan dan tidak salah, dikarenakan memang dalam realitas empiriknya memperlihatkan kondisi yang tidak jauh berbeda dari pendapat atau asumsi tersebut.⁴⁰

Gerakan radikal di dunia Barat dalam aspek keagamaan sudah terjadi sejak sejarah Kekristenan. Bernard Lewis mengatakan, sejarah Kristen diwarnai dengan perpecahan (*skisma*) dan kekafiran (*heresy*), dan dengan konflik antar kelompok

³⁸ Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 26-27.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ M. Sidi Ritaudin, "Radikalisme Negara dan Kekuasaan Perspektif Politik Global", dalam *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam IAIN Raden Intan Lampung Vol.08, No.02 (2014)*, 349.

yang berujung pada peperangan dan penindasan. Sejarah bermula sejak zaman Konstantin Agung, di mana terjadi konflik antara Katolik dan Protestan dan antara berbagai sekte dalam Kristen. Setelah konflik-konflik berdarah banyak terjadi, maka muncul kalangan Kristen yang berpikir, bahwa kehidupan toleran antar kelompok masyarakat hanya mungkin dilakukan jika kekuasaan Gereja untuk mengatur politik dihilangkan, begitu juga campur tangan negara terhadap Gereja.⁴¹

Pada zaman hegemoni kekuasaan Gereja, lahirlah sebuah institusi Gereja yang sangat terkenal kejahatannya dan kekejamannya, yang dikenal sebagai “*Inquisisi*”. Karen Armstrong, seorang mantan biarawati dan penulis terkenal, menggambarkan kejahatan institusi Inquisisi Kristen dalam sejarah sebagai berikut: “sebagian besar kita tentunya setuju bahwa salah satu dari institusi Kristen yang paling jahat adalah Inquisisi, yang merupakan instrumen teror dalam Gereja Katolik sampai dengan akhir abad ke-17. Metode Inquisisi ini juga digunakan oleh Gereja Protestan untuk melakukan penindasan dan kontrol terhadap kaum Katolik di negara-negara mereka.”⁴²

Munculnya gereja Kristen sebagai institusi dominan dalam masyarakat Kristen Barat merupakan masa yang sangat pahit dalam sejarah peradaban Barat,

⁴¹ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 30.

⁴² Karen Armstrong, *Perang Suci : dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, Terj. Hikmat Darmawan, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2001), 456. Perlu dicatat, bahwa kekejaman Inquisisi dilakukan oleh Gereja, yang memegang otoritas atau wakil Tuhan. Kondisi ini sangat berbeda dengan Islam yang tidak mengenal institusi kekuasaan agama (rahbaniyyah). Paus adalah Wakil Kristus (Vicar of Christ) yang diklaim mempunyai sifat infallible (tidak dapat salah). Dan ketika paus melegalisasi berbagai kekejaman dan penindasan, maka hal itu dilakukan sebagai wakil Tuhan. Inilah yang tidak terjadi pada tradisi Islam. Jika ada penguasa Islam yang melakukan kesalahan atau kezaliman, maka itu dilakukannya sebagai individu dan tidak atas legalitas keagamaan, meskipun mungkin ia menggunakan alasan keagamaan tertentu. Misal, ada sejumlah laporan yang menyebutkan adanya penguasa Muslim yang memaksa orang-orang Yahudi masuk Islam. Tindakan seperti ini, jika benar, jelas tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Karen Armstrong mengakui, bahwa tidak ada tradisi persekusi dalam sejarah ajaran Islam. “*There was no tradition of religious persecution in the Islamic empire.*” tulis Armstrong. (Karen Armstrong, *Perang Suci*, 44)

masa ini disebut sebagai “zaman kegelapan” (*the dark ages*) sekitar abad ke-14 hingga masuk zaman *renaissance* abad ke-15. Zaman ini merupakan masa dimana segala hak kehidupan bahkan kematian masyarakat dibawah cengkraman kekuasaan Gereja.⁴³

Pada masa modern seperti sekarang aksi teror dapat terjadi di mana saja, di negara maju, berkembang, maupun terbelakang. Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri AS yang dirilis pada 31 Juli 2012, pada tahun 2011 telah terjadi kurang lebih 10.000 aksi teror di 70 negara yang mengakibatkan 12.500 korban meninggal dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sasaran atau target teror tidak selalu melihat negara maju atau tidak, tapi lebih kepada negara tersebut bertentangan atau tidak dengan paham ideologi kaum radikal.⁴⁴

Beberapa kasus, aksi teror akan semakin meluas ketika isu politik internasional juga dimasukkan dan dijadikan sebagai bahan pemicu konflik atau kekerasan di berbagai belahan wilayah dunia oleh kelompok radikal. Isu lingkungan strategis global perlu diperhatikan, menyangkut isu-isu politik internasional berkaitan entitas agama, yang kapan pun bisa secara cepat atau lambat memiliki dampak sebagai pemicu aksi teror. Pada saat ini Islam menjadi sorotan dunia global, Islam banyak dipandang sebagai kekuatan sosial keagamaan yang sedang mencari tempat di politik global. Dalam tataran global, dunia tengah menghadapi ancaman perang non konvensional, perang yang dihadapi oleh negara-negara saat ini bergeser dari

⁴³ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat...*, 30.

⁴⁴ Taufiqurrahman, “*Peran Nahdlatul Ulama dalam Menangkal Gerakan Radikalisme Global di Indonesia*” (Skripsi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 39-40.

bentuk konvensional menuju perang tanpa teritori menghadapi ancaman radikalisme.⁴⁵

Salah satu aksi terorisme yang terlihat dalam sejarah modern umat manusia adalah bom yang menghancurkan bangunan besar kantor Federal di Oklahoma City hari Rabu 19 April 1995. Kejadian ini membuat para pakar masalah terorisme memberi tanggapan spekulatif dan mengaitkan tragedi tersebut dengan perbuatan kaum “fundamentalis” Muslim Timur Tengah, telah mengusik ketenangan hidup kaum Muslim Amerika keturunan Arab yang tinggal di Amerika Serikat, terutama mereka yang tinggal di sekitar Oklahoma. Masyarakat Muslim-Arab-Amerika merasakan betapa menyakitkannya teror yang mereka terima dari sebagian masyarakat Amerika yang menuduhnya sebagai pelaku pengemboman, akibat dari *stereotyping* (pelabelan).⁴⁶

Selain itu tersirat jelas pada perang dingin antara kelompok negara-negara Barat dan kelompok negara-negara Timur Tengah. Dimana Amerika dan Israel dianggap sebagai dalang dalam penindasan umat Islam yang kemudian membuat para kelompok radikal dan ekstrimis melancarkan aksi perlawanan yang tidak hanya ditujukan kepada Amerika dan Israel, namun negara-negara pendukung atau bahkan yang hanya berhubungan dalam aspek ekonomi dan budaya dalam lingkup kecil pun juga menjadi target penyerangan.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme*, 131.

E. Radikalisme di Indonesia

Dalam catatan sejarah radikalisme Islam semakin menggeliat pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi, sejak Kartosuwirjo memimpin operasi 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII). Sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, justifikasi agama dan sebagainya. Dalam sejarahnya gerakan ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto, hanya saja bedanya, gerakan radikalisme di era Soeharto sebagian muncul atas rekayasa oleh militer atau melalui intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya, ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII, sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad, dalam rangka memojokkan Islam. Setelah itu sejak jatuhnya Soeharto, ada era demokratisasi dan masa-masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih nyata, lebih militan dan lebih vokal, ditambah lagi dengan liputan media, khususnya media elektronik, sehingga pada akhirnya gerakan ini lebih tampak.⁴⁷

Setelah gerakan Darul Islam, lalu muncul Komando Jihad (Komji) pada tahun 1976 dan meledakkan tempat ibadah. Kemudian, pada tahun 1977, Front Pembebasan Muslim Indonesia melakukan hal sama dan tindakan teror oleh Pola Perjuangan Revolusioner Islam pada tahun 1978. Tidak lama kemudian, setelah pasca reformasi muncul lagi gerakan yang beraroma radikal yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top dan gerakan-gerakan radikal lain yang bertebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon dan yang lain sebagainya. Semangat radikalisme tentu tidak luput dari persoalan politik. Persoalan politik

⁴⁷ Ahmad Asrori, "Radikalisme di Indonesia....", 256.

memang seringkali menimbulkan gejala-gejala tindakan yang radikal. Sehingga berakibat pada kenyamanan umat beragama yang ada di Indonesia dari berbagai ragamnya.⁴⁸

Dalam buku Afadlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, terdapat fakta bahwa munculnya gerakan radikalisme di Indonesia terkait erat atau dipicu oleh persoalan domestik di samping oleh konstelasi politik internasional yang dinilai telah memojokkan kehidupan sosial politik umat Islam. Berbagai kemelut domestik yang melanda umat Islam, seperti pembantaian kyai dengan berkedok dukun santet, sampai tragedi Poso (1998), dan tragedi Ambon (1999) di mana umat Islam menjadi korban. Ini merupakan bukti dari penyebab munculnya fenomena radikalisme di Indonesia.⁴⁹

Salah satu gerakan radikal yang masih dibicarakan di Indonesia adalah Wahabisme atau biasa disebut dengan Wahabi, merupakan gerakan yang didasarkan pada pemikiran dan ajaran Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab. Kaum Wahhabiyyun sesungguhnya lebih senang disebut kaum Muwahhidun dari pada Wahabi. Persepsi orang di luar Wahabi menggolongkan gerakan Wahabi sebagai sebuah bentuk aliran (sekte) Islam, radikal, tidak toleran, anti tasawuf, penentang keras bid’ah, khurafat, dan takhayyul, bahkan dipandang sebagai ideologi terorisme, namun dibantah oleh pengikut Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab. Gerakan ini mengajarkan orang untuk kembali kepada jalan yang benar dengan keyakinan tauhid yang benar.⁵⁰

Salah satu Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, Ali Mustafa Yaqub, menyebutkan bahwa persamaan-persamaan ajaran Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, 149.

⁵⁰ Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme*, 107.

dengan kebanyakan masyarakat Muslim Indonesia. Di antara titik-titik temu itu adalah: *pertama*, sumber syariat Islam adalah al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. *Kedua* adalah konsekuensi menjadikan ijma' sebagai sumber syariat Islam, shalat Jumat dengan dua kali azan dan shalat tarawih dengan 20 rakaat. *Ketiga*, dalam beragama, Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab dan kebanyakan masyarakat Muslim Indonesia menganut satu mazhab dari mazhab fiqh yang empat.

Dalam praktiknya, menurut Ali Mustafa Yaqub, terdapat perbedaan diantara keduanya, namun tidak menjadi permasalahan. Banyak anak Nadhlatul Ulama yang belajar di Arab Saudi yang *notabene* adalah pengikut Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab. Bahkan, banyak jamaah haji Muslim Indonesia yang shalat di belakang imam Wahabi, dan ternyata hal itu tidak menjadi masalah.⁵¹

F. Perkembangan Radikalisme di Aceh

Kajian mengenai kekerasan di Aceh sudah banyak diteliti oleh peneliti pendahulu, terlebih dengan pengalaman Aceh bergabung dengan Republik Indonesia. Hampir setiap relung sejarah, kekerasan selalu terjadi di provinsi ini. Oleh karena itu, membuka kajian mengenai kekerasan, sama dengan membuka kelopak mata sejarah Aceh yang selalu diwarnai dengan kekerasan.⁵²

Secara historis, Aceh memang telah ditarik pada jurang konflik yang bernuansa etnik, sejak tahun 1970-an. Tarikan dan kontribusi masyarakat internasional terhadap konflik yang bernuansa etno-nasionalis ini berakhir pada 15 Agustus 2005. Konflik terbuka yang melibatkan senjata ini berlangsung selama

⁵¹ *Ibid*, 111-112.

⁵² Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Memahami Potensi Radikalisme....*, 23.

hampir tiga dekade. Pada saat itu tokoh yang dimunculkan adalah (alm) Dr. Tgk. Hasan di Tiro. Pola yang diperankan oleh Tgk. Hasan di Tiro memang bukan berjuang untuk mendirikan Negara Islam, akan tetapi perjuangan Tgk. Hasan di Tiro sarat dengan nilai-nilai perjuangan ke-Islaman, meskipun pada ujungnya gerakan ini hanya menuntut pemimpin simbolik Aceh dipegang oleh seorang *Wali Nanggroe* (Wali Negara). Namun, pengiriman anak-anak muda Aceh ke Libya untuk berlatih perang cukup memperlihatkan bagaimana proyek *maktabah islamiyah* di dunia ini hendak dibangun oleh Muammar Qadhafi. Karena itu di Libya, latihan militer dilakukan juga oleh kombatan dari Mindanao, Pattani, dan beberapa kelompok militan lainnya di Afrika. Hampir 30 tahun lebih, alumni Libya melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Mereka memiliki keahlian perang yang tidak kalah jauh dari TNI (Tentara Nasional Indonesia).⁵³

Pada saat yang sama, pada era Perang Dingin (*Cold War*), terdapat pula kamp-kamp militer yang menampung para mujahidin dari negeri-negeri Islam. Tujuannya adalah untuk membantu negara Timur Tengah supaya tidak mendapat pengaruh dari negara Komunis yaitu Uni Sovyet. Dalam konflik ini, Aceh tidak terlibat sama sekali, karena aktivis mujahidin yang dikenal dengan istilah teroris, ditempatkan di kawasan Mindanao. Di kawasan tersebutlah, latihan militer dilakukan untuk menjadi Asia Tenggara sebagai medan jihad, paska Afganistan. Karena itu, persoalan teroris tidak begitu dijadikan sebagai sumber konflik di Aceh, terutama dalam beberapa operasi militer, paska DOM (Darurat Operasi Militer) 1998. Namun, paska penandatanganan MoU 2005, persoalan teroris di Aceh mulai mencuat.

⁵³ Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad & M.Hasbi Amiruddin, *Ulama, Separatisme, dan Radikalisme di Aceh*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 88.

Puncaknya adalah ketika terjadi peristiwa lain di Jantho pada tahun 2010, di mana beberapa jejaring teroris dari Jawa mulai melakukan latihan militer di Aceh. Adapun dampak dari upaya ini adalah salah satu teroris yang paling dicari yaitu Dulmatin, yang kemudian tewas tertembak oleh aparat keamanan. Setelah itu, peristiwa terorisme di Indonesia cenderung merupakan teroris produksi lokal. Mereka sama sekali tidak pernah ke luar negeri, apalagi mengenyam dunia pendidikan militer, baik di Timur Tengah maupun di Mindanao, sebagaimana generasi awal *Jema'ah Islamiyyah*.⁵⁴

Provinsi Aceh sendiri terdapat beberapa kemungkinan yang akan mengundang kekhawatiran mengenai gejala radikalisme yaitu: *aliran sesat, kristenisasi, benturan pemikiran* dalam persoalan formalisasi Syari'at Islam. Adapun bentuk konflik lain yaitu persoalan neo-separatisme, milisi dan mantan kombatan, persoalan Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS), dan isu pertanahan. Adapun konflik yang belum disentuh oleh masyarakat Aceh adalah intervensi pihak asing di dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Aceh. Harus diakui bahwa persoalan energi masih menjadi incaran negara-negara maju. Adapun skala global adalah konflik kepentingan antara Amerika dan sekutunya dengan Cina berikutan dengan aliansinya (Rusia dan Korea Utara). Dari empat skala potensi konflik tersebut, maka agama masih berada pada persoalan utama. Adapun konflik yang kedua, peran agama mungkin tidak akan begitu signifikan. Sementara pada model kedua tentang SDA Aceh terlihat tidak menjadi agenda penting Pemerintah Aceh. Terlebih lagi persoalan yang keempat, karena Aceh tidak

⁵⁴ *Ibid*, 89.

ditempatkan pada *pelaku* dan *pemain* dalam pencaturan konflik kepentingan antara Amerika dan Cina. Dalam persoalan terakhir ini, Aceh boleh jadi hanya sebagai objek.⁵⁵

Karena bidikan bagian ini adalah gejala radikalisme, maka perlu dipetakan bagaimana masa depan dan peluangnya di Aceh. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa potensi radikalisme di Aceh tidak akan bersinggungan dengan potensi radikalisme yang ada di belahan negeri-negeri Muslim seperti pendirian Negara Islam atau *Khalifah Islamiyyah*. Potensi ini tidak akan begitu mencuat melihat pelaku pada aspek kekuatan politik, masih didominasi oleh mantan eksponen GAM. Paling tidak hingga 7-8 tahun ke depan, mereka yang menguasai eksekutif dan legislatif, tidak akan menggunakan isu Negara Islam atau *Khalifah Islamiyyah* sebagai aset untuk mencari simpati pengikutnya. Demikian pula, mereka tidak akan menjadikan Barat sebagai musuh di dalam setiap agenda perjuangan politik. Karena itu, persoalan yang menjadi akar kemunculan radikalisme akan terjerembab pada kelompok non-GAM. Misalnya, kelompok yang masih menginginkan adanya perbaikan kehidupan rakyat Aceh melalui pendirian Khilafah Islamiyyah, sebagaimana terlihat di dalam agenda beberapa gerakan Islam di Aceh, seperti HTI.⁵⁶

Sementara GAM sendiri sudah tidak lagi memiliki kata sepakat di dalam menjalankan roda perjuangan mereka. Adapun kelompok yang masih menginginkan kemerdekaan, boleh jadi kelompok yang tidak setuju dengan perdamaian di Aceh dan kelompok yang tidak mampu “menikmati” hasil damai di Aceh. Dua kelompok ini tentu saja akan berevolusi menjadi kelompok baru, namun mereka tidak akan

⁵⁵ Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad & M.Hasbi Amiruddin, *Ulama, Separatisme.....*, 90.

⁵⁶ *Ibid*, 91.

menjadikan agama, terlebih lagi Negara Islam ataupun Khilafah Islamiyyah, sebagai agenda perjuangan. Namun, militansi untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tetap masih ada, minimal pada kelompok GAM yang berada di luar negeri. Namun, karena mereka tidak lagi memiliki basis latihan militer seperti era Kolonel Qhadafi, maka dapat dipastikan, kalau pun masih menggunakan senjata, akan berubah menjadi kelompok radikal yang non-agamis. Paling tidak, mereka yang masih memikirkan perang, tidak lagi merupakan alumni Libya, melainkan mereka yang dididik di Aceh atau diluar negeri untuk level diplomasi. Akan tetapi mengingat negara-negara Eropa dan Ameika tidak lagi “membesarkan” tokoh-tokoh inti dari kelompok ini, maka dapat dipastikan, gerakan neo-GAM hanya terbatas pada kelompok militansi semata. Boleh jadi, gaya perjuangannya akan mirip seperti di Pattani dan Mindano.⁵⁷

Adapun isu Syari’at Islam masih akan terus menjadi hal penting pada beberapa tahun ke depan. Hal ini disebabkan kelompok-kelompok yang menginginkan formalisasi Syari’at Islam tidak akan berhenti berjuang, sebelum ada pemberlakuan *hudud*⁵⁸ di Aceh. Kelompok ini akan mudah disusupi oleh kelompok radikalisme yang tidak menggunakan kekerasan, namun memiliki usaha yang cukup massif untuk mempengaruhi publik, yang akan membentuk sistem berpikir masyarakat Aceh agar melaksanakan Syari’at Islam secara kaffah. Akan tetapi pada lebel akar rumput, masyarakat akan terbelah pada tiga tingkat. Adapun yang

⁵⁷ *Ibid*, 92.

⁵⁸ Secara etomologi *hudud* adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman. Secara terminologi, *hudud* adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya. Lihat, Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’i: Edisi Lengkap, Muamalat, Munakahat, dan Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 572.

pertama, tingkat yang paling pedalaman, di mana mereka tetap bertahan dengan pengetahuan keagamaan mereka secara living tradition dan local wisdom. Adapun tingkat *kedua*, kelompok masyarakat yang menginginkan adanya penyelesaian pelanggaran Syari'at Islam secara komprehensif. Mereka memandang bahwa ketika tidak ada pelaksanaan Syari'at Islam, maka pelanggaran demi pelanggaran di Aceh masih akan terus terjadi. Sementara kelompok yang *ketiga* adalah kelompok yang sedang menyusun kekuatan untuk mengubah Aceh ke arah yang lebih baik, melalui menunggu waktu yang tepat. Kelompok ini memang belum muncul ke permukaan, namun kelompok ini nanti yang akan melakukan berbagai upaya di Aceh dengan mengambil semangat dari apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini.⁵⁹

Ketiga kelompok di atas ada yang tampak dan ada pula yang tidak kelihatan aktivitasnya. Sebab, kelompok kedua dan ketiga akan bersinergi untuk menekan pemerintah, sambil mempersiapkan kader-kader mereka untuk terjun ke dalam masyarakat. Di sinilah nanti, potensi-potensi konflik, sebagaimana dijelaskan di atas, akan menjadi target operasi kelompok ketiga. Ketika semua potensi diarahkan pada agama, maka persoalan jihad akan menjadi sesuatu yang perlu dilakukan, demi perubahan yang harus diidamkan dalam waktu yang amat dekat. Kedua kelompok terakhir ini, tentu saja akan bangkit, mana kala masyarakat Aceh tidak lagi mempercayai eksponen GAM dan emosi masyarakat diledakkan dengan perilaku mantan kombatan selama satu dekade terakhir. Titik perpisahan ini adalah saat ketidakpercayaan masyarakat terhadap perilaku GAM. Pola ini tentu saja akan dimulai dengan isu perpecahan Aceh, baik itu dengan konflik maupun dengan isu

⁵⁹ *Ibid*, 93

pemekaran. Saat itu, dari kelompok GAM tidak ada lagi tokoh pemersatu yang kharismatik.⁶⁰

Salah satu gejala masyarakat yang dapat dikelola adalah kemampuan masyarakat di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan agama. Pengalaman masyarakat “main hakim” sendiri dengan cara membakar atau membunuh siapa saja yang mereka anggap salah atau keliru menurut pemahaman keagamaan mereka. Pola ini akan terus terjadi, khususnya jika dikaitkan dengan persoalan aliran sesat atau kristenisasi. Dua hal ini akan menjadi mesiu baru di dalam mempertahankan gejala radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Terutama, ketika pemerintah absen di dalam menyelesaikan setiap kekisruhan yang muncul di tengah masyarakat. Hal inilah yang kemudian dikelola oleh kelompok radikalisme untuk menggerakkan masyarakat untuk mengatasnamakan agama ketika melakukan kekerasan. Alhasil, potensi konflik yang telah ada di Aceh tentu saja akan mendukung potensi radikalisme agama.⁶¹

Salah satu gejala yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang dilakukan oleh kelompok radikalisme Aceh yang sedang menuntut ilmu di Timur Tengah. Ketika dilakukan penelitian keulamaan di Aceh, para ulama menyadari betul akan ancaman ini. Sambil mereka memikirkan exit strategy dari penyemaian benih-benih radikalisme di Timur Tengah, khususnya di Yaman. Pada era Perang Dingin proses pengiriman mujahidin yang kemudian diubah menjadi teroris dilakukan di Pakistan dengan lahan perjuangan di Afghanistan. Sementara setelah era kejatuhan beberapa kekuatan besar di Timur Tengah yaitu Saddam Hussein, Osama bin Laden, dan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid*, 94.

Muammar Qadafi, proses Arab Spring telah menyebabkan pola gejala radikalisme di Timur Tengah dijadikan sebagai kekutatan untuk menghadang kekuatan pemerintah masing-masing. Di atas itu semua, beberapa kelompok Islam Radikal yang memiliki sayap perjuangan di Asia Tenggara juga tidak tinggal diam. Mereka tentu saja tidak akan menngulang sejarah penyemaian radikalisme seperti era Perang Dingin, yaitu belajar berjihad untuk menghadang kekuatan komunis, lalu dimunculkan fatwa pada tahun 1998 mengenai kewajiban membunuh Amerika dan Sekutunya.⁶²

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia dikejutkan dengan perang tanding di Yaman, di mana saat itu, terdapat banyak sekali santri dari Indonesia yang terlibat, tidak terkecuali dari Aceh. Mereka dilatih menggunakan persenjataan, di samping menimba ilmu pengetahuan. Saat itu, muncul dua istilah Santri Garuda dan non-Santri Garuda. Adapun model santri *pertama* adalah santri yang mengembangkan tradisi *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Sementara yang *kedua* adalah model santri yang boleh jadi akan menjalankan misi jihad seperti pada era Maktab Khidamat di Peshawar, Pakistan. Model santri yang kedua inilah yang paling dikhawatirkan, jika mereka kembali ke tanah air, setelah mereka menimba ilmu di Yaman. Kepulangan mereka boleh jadi akan membuat ladang jihad baru di Indonesia. Pola penyemaian benih-benih radikalisme ini akan mengalami musim panen pada masa sekitar beberapa tahun berikutnya. Hal ini nantinya akan ditunjang oleh warisan persoalan di dalam negeri, terutama ketika Negara berada di dalam keadaan yang tidak stabil.⁶³

Setelah itu, mereka juga akan menjalin hubungan kerja sama dengan sesama alumni yang berada tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara tetangga.

⁶² *Ibid*, 95.

⁶³ *Ibid*.

Dalam hal ini, menurut pengalaman Mujahidinn Afghanistan, mereka menjadikan Mindano sebagai pusat latihan untuk distribusi jihad di tingkat Asia Tenggara. Adapun ladang jihadnya adalah Indonesia, karena Negara ini memiliki potensi yang amat besar untuk persoalan isu-isu keagamaan. Jadi, perlu diprediksi kawasan mana yang akan dijadikan sebagai basis *qaidah aminah*, jika alumni Yaman kembali ke negara mereka masing-masing di Asia Tenggara. Ada beberapa tempat yang akan berpotensi menjadi ladang jihad di kawasan Asia Tenggara yaitu kawasan-kawasan yang masih memiliki jejaring Islam Radikal. Dalam konteks ini, Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, dan Mindano masih menjadi kawasan-kawasan yang dijadikan sebagai target untuk membangun *qaidah aminah*.⁶⁴

Melihat gejala Timur Tengah, di mana kelompok oposan cenderung diberitakan sebagai “pahlawan” oleh media Barat, maka hal ini juga perlu ditinjau kembali, kelompok-kelompok oposisi Asia Tenggara yang berbasis agama. Hanya saja, saat ini, beberapa kelompok oposisi malah cenderung tidak menjadikan agama sebagai alat perjuangan mereka. Di Malaysia, kelompok oposisi yang diperankan oleh Anwar Ibrahim cenderung memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan agak “dimanjakan” oleh media Barat. Di Thailand Selatan, upaya untuk mempertemukan kelompok separatis dengan pemerintah, terus dilakukan secara intensif. Bahkan di Manila, gerakan pemberontakan di kawasan Mindano juga sudah berhasil mencapai beberapa kata sepakat pemerintah di Manila. Di Aceh, GAM sudah mencapai kata sepakat dengan pemerintah Republik Indonesia. Hanya saja di Poso dan Papua, situasi masih tidak menentu. Karena itu, situasi Asia Tenggara

⁶⁴ *Ibid*, 96.

cenderung agak stabil dari persoalan radikalisme agama. Masyarakat tidak bisa memprediksi isu apa yang akan menyemangati kemunculan generasi baru radikalisme. Hal ini disebabkan, karena isu-isu keagamaan dan separatisme masih mendominasi dan memiliki akar persoalan konflik di Asia Tenggara. Hal ini belum lagi dengan persoalan etnisitas yang terkadang menggiring pada persoalan radikalisme.⁶⁵

Karena itu, jika melihat pola penyemaian benih-benih radikalisme di Aceh, melalui pengiriman santri-santri ke Timur Tengah, khususnya Yaman, maka dapat diprediksi mereka akan pulang pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini disebabkan, pengalaman konflik di Indonesia yang terkait dengan radikalisme terjadi secara serentak. Misalnya alumni Afghanistan melakukan aksi mereka secara “serentak” melalui bom, seperti “bom Natal” kemudian bom di Bali baik yang pertama maupun yang kedua. Sedangkan teroris “generasi baru” cenderung melakukan pemboman dengan skala kecil, tetapi mampu mengundang perhatian tidak hanya nasional, tetapi juga internasional. Saat itu, generasi baru ini tidak begitu kuat, dibandingkan dengan generasi Afghanistan dan generasi Mindano. Apa yang ingin ditegaskan bahwa Indonesia menghadapi persoalan radikalisme sejak tahun 1998, tepatnya setelah era Reformasi. Jika ditelisik, para radikal pulang ke Indonesia memang menjelang Reformasi atau setelah Reformasi berlangsung di Jakarta. Hampir dapat dipastikan bahwa gerakan-gerakan Radikal di Indonesia lahir setelah Reformasi, kecuali

⁶⁵ *Ibid*, 97.

Jema'ah Islamiyyah yang dianggap lahir pada tahun 1995-1996, yang merupakan jejaring *al-Qaeda*.⁶⁶

Dari skema di atas menyiratkan bahwa gerakan radikalisme di Indonesia memiliki jejaringan yang saling terhubung. Skema di atas adalah berdasarkan data pada tahun 2004. Setelah itu, sangat boleh jadi, ada penambahan jejaring atau pengurangan. Karena ada beberapa tokoh terkemuka yang tewas ataupun ditangkap. Tentu saja pola penyebaran jaringan di atas akan berlaku dengan cara serupa, jika para alumni Yaman kembali ke Indonesia, tidak terkecuali di Aceh. Salah satu tempat yang menjadi pusat penampungan adalah kemunculan pesantren atau pusat pengkajian keagamaan yang sama sekali berbeda dengan wajah lokal. Pesantren ini didirikan dengan pola tidak sama dengan keadaan dayah.⁶⁷

Selain itu, metode melalui perkawinan merupakan cara yang amat lazim di dalam sebuah jejaring gerakan Islam. Biasanya, kelompok inti akan mencari kelompok simpatisan untuk membuat satu jaringan keluarga besar, melalui perkawinan. Dari sini kemudian dibentuk satu kelompok sel baru yang akan menampung siapa saja yang akan bergabung ke dalam jejaring tersebut. Metode ini tidak mengherankan jika kemudian beberapa aktivis gerakan Islam, baik di Indonesia maupun di luar negeri, memiliki lebih dari satu isteri. Upaya ini dipandang untuk memperkuat kekuatan basis, jika nanti sewaktu-waktu diperlukan dalam aksi pengerahan massa atau untuk menampung sesiapa saja yang akan bergabung.⁶⁸

Adapun pola perampokkan adalah pola untuk mencari dana sebanyak mungkin, karena menganggap bahwa Indonesia bukan Negara Islam. Dengan kata

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid*, 98.

⁶⁸ *Ibid.*

lain, negara ini merupakan dar al-harb . Oleh sebab itu, maka harta yang didapatkan didalam perampokan dipandang sebagai harta fay . Dalam sejarah jejaringan gerakan Islam, mereka tidak segan-segan melakukan perampokkan pada bank atau siapa saja yang patut menjadi target operasi. Pola ini sangat berbeda dengan pola anggaran yang dilakukan oleh Pesantren Zaytunah yang dipandang sebagai bagian penggalangan dana.⁶⁹

Dari kenyataan di atas, dapat dipastikan bahwa pola-pola lama akan dijalankan ketika kepulangan para alumni Yaman. Selain mereka sudah mendapatkan latihan militer dan reproduksi kebencian terhadap Barat dan Syi'ah, mereka juga akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan lokal di Indonesia, seperti konflik Poso atau Syari'at Islam di Aceh.

Penjelasan tersebut mencoba memprediksi beberapa kemungkinan pemetaan gerakan radikalisme di Aceh. Hanya saja, dalam gambaran ini, persoalan global, nasional, dan lokal, tidak akan dipungkiri akan menjadi faktor penentu di dalam penyebaran sel-sel gerakan radikalisme, terlebih lagi yang menuju pada arah terorisme. Dapat dilihat bahwa kesinambungan gerakan radikalisme di Indonesia, tidak terkecuali di Aceh, akan terus berlanjut. Hanya saja saat ini, kelompok-kelompok tersebut telah membangun jejaring tersendiri yang sama sekali tidak pernah diangkat ke permukaan. Akan tetapi jejaringan gerakan radikalisme akan diketahui, setelah ada aksi terorisme. Dengan kata lain, upaya pencegahan sangat jarang dilakukan sebelum muncul aksi-aksi yang merugikan ummat Islam.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, 99.

⁷⁰ *Ibid*, 100.

Bahkan beberapa gejala yang dahulunya merupakan kekhawatiran radikalisme telah terjadi di beberapa tempat di provinsi Aceh. Yaitu, *pertama*, persoalan Kristenisasi yang terjadi di beberapa tempat di Aceh memicu aksi kekerasan. Dalam satu acara di Kabupaten Aceh Singkil (Rimo) pada tahun 2014. Yang diadakan oleh satu instansi pemerintahan provinsi mencuat masalah Kristenisasi merupakan masalah yang akan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Aceh dengan provinsi Sumatera Utara. Persoalan pendirian rumah ibadah di kawasan tersebut dianggap akan memicu aksi masyarakat untuk bertindak secara sepihak dalam rangka menentang upaya kegiatan kelompok non-Islam.

Persoalan Kristenisasi juga dijumpai di Aceh Tamiang yang berbatasan langsung dengan wilayah provinsi Sumatera Utara. Menurut beberapa informan, tanah-tanah di kawasan tersebut telah dibeli oleh pihak non-Islam, yang selanjutnya dijadikan sebagai strategi untuk penguatan wilayah. Sebab, jika tanah sudah dikuasai oleh pihak non-Muslim, maka mereka akan mendatangkan umat Kristiani di tanah yang sudah dibeli. Oleh karenanya, diduga kuat pendirian rumah ibadah ilegal di Kabupaten Singkil dilakukan melalui model strategi ini. Akibatnya, tidak mengejutkan jika kemudian muncul sikap resistensi dari umat Islam di daerah tersebut.

Kedua, aliran sesat. Persoalan ini kadang memicu aksi kekerasan yang dilakukan oleh warga, khususnya dalam menyikapi aliran-aliran yang disinyalir sesat. Bahkan di Aceh telah muncu Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama No.7, tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat. Pada saat yang sama, aliran yang berada

diluar fatwa MPU tersebut sudah berkembang di Aceh. Dalam studi tentang aliran pemikiran keagamaan di Aceh, ditemukan ada kelompok yaitu: *Pertama*, Millah Abraham yang muncul di Aceh pada tahun 2008, dipimpin oleh Zainuddin bin Saleh. *Kedua*, Darul Arqam yang berasal dari Malaysia dan disinyalir sesat. *Ketiga*, aliran Syi'ah, dimana hampir semua golongan di Aceh tidak memberikan ruang gerak, karena dipandang sesat. *Keempat*, tarekat Haji Ibrahim Bonjol yang didirikan oleh Ibrahim sari Bonjol Pasaman, yang berkembang di Aceh Tengah. *Kelima*, aliran Ahmadiyah Qadiyah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani dan masih banyak aliran yang dianggap sesat lainnya.⁷¹

Kasus-kasus aliran sesat ini, sering mengundang amuk massa, karena aliran-aliran tersebut telah ditetapkan sesat oleh MPU. Sehingga massa memandang bahwa akan menjadi masalah besar jika aliran atau pengajian yang telah ditetapkan sesat terus menjalani aktivitasnya. Sementara kasus yang paling tragis adalah pembakaran hidup-hidup terhadap pimpinan aliran yang dipimpin oleh Teungku Aiyub di Plimbang, Aceh Jeumpa (sekarang: Bireun). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tata kelola terhadap kemunculan aliran atau keyakinan yang berkembang beda dengan keyakinan mayoritas masyarakat Aceh, dapat dianggap sebagai alat pemicu aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Hal ini disebabkan ketika massa sudah tidak mampu mengontrol diri mereka, kerap kekerasan atas nama agama dilakukan terhadap Muslim yang ditetapkan sesat oleh MPU.⁷²

Dalam literatur studi pertahanan di Indonesia, Aceh cenderung dipandang sebagai “objek” dari sekian kebijakan yang tidak boleh dituntaskan, karna alasan

⁷¹ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Memahami Potensi Radikalisme....*, 117.

⁷² *Ibid*, 119.

keamanan provinsi yang tidak pernah stabil. Kajian ini memberikan beberapa pandangan mendasar mengapa Aceh tidak perlu lagi dianggap sebagai objek, tetapi diarahkan pada tahapan subjek, dalam tata pikir kosmik dan tata pikir sistem pertahanan Indonesia. Dalam konteks tersebut, kemunculan isu radikalisme dan terorisme di Aceh adalah dalam rangka menjadikan aceh sebagai “objek konflik”, setelah daerah ini dijadikan “objek konflik” di dalam bidang separatisme. Kondisi ini memperlihatkan bahwa citra pertahanan Indonesia untuk Aceh, bukan sebagai “subjek” untuk mengamankan NKRI, tetapi sebagai objek ketika mengatakan bahwa Indonesia “tidak aman”, karena Aceh selalu bergejolak.⁷³

Pada tahun 2010, Aceh dikejutkan dengan penangkapan beberapa teroris di Aceh Besar, Jantho. Walaupun tidak ada pernyataan resmi dari pihak terkait apakah benar ada dan tidaknya teroris di Aceh. Akan tetapi terkait dengan kedatangan teroris ke Aceh, sudah muncul setelah Tsunami. Mereka melebur dalam masyarakat Aceh dan terus memanfaatkan situasi Tsunami dan perdamaian di Aceh.⁷⁴

Pada tahun 2015, ribuan santri pengikuti Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) dari berbagai daerah di Provinsi Aceh menggelar demonstrasi dan menyuarakan penolakan terhadap sejumlah ajaran agama yang dianggap sesat, di Kompleks Makam Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Salah satu tuntutan adalah melarang Wahabi berkembang di Aceh. Menurut gerakan ini, Wahabi adalah salah satu aliran sesat yang sangat membahayakan aqidah umat Islam. Massa kebanyakan berasal dari kalangan dayah tradisional.⁷⁵ Pawai tersebut juga diisi dengan pembacaan

⁷³ *Ibid*, 60.

⁷⁴ *Ibid*, 67.

⁷⁵ “Massa Aswaja Padati Banda Aceh”, <http://aceh.tribunnews.com/2015/09/10/massa-aswaja-padati-banda-aceh>. Diakses pada Sabtu, 09 Maret 2019.

rekomendasi dengan beberapa tuntutan yang diarahkan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Diantara tuntutannya adalah mendesak Pemerintah Aceh untuk menghentikan aktivitas Salafi Wahabi, Syi'ah, Komunis dan aliran-aliran sesat lainnya di seluruh Aceh. Menyimak poin-poin yang menjadi tuntutan diatas menunjukkan bahwa pawai tersebut mengondisikan massa untuk menjadi pecinta Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dan menolak Wahabi serta aliran yang dianggap sesat lainnya di Aceh. Hal ini selaras pula dengan beberapa spanduk dan tulisan yang diarak massa pada hari tersebut seperti: "Wahabi Enyahlah dari Aceh", "Wahabi Haus Darah Ulama Aceh", dan lain-lain. Kandungan imbauan tersebut sudah meletakkan Wahabi sejajar dengan aliran sesat lainnya.⁷⁶

Selain itu pada tahun 2018, kasus penolakan penceramah juga terjadi di salah satu di Mushalla Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Sejumlah jamaah menolak pengajian yang disampaikan Ustadz Farhan, selesai pelaksanaan shalat subuh, jamaah menilai pengajian yang disampaikan Ustadz Farhan dan pengikutnya menjurus pada ajaran wahabi dan menyesatkan. Selain itu, menurut jamaah, Ustadz Farhan dianggap selalu meresahkan masyarakat dan membid'ahkan amalan- amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah serta mencaci maki ulama di Aceh.⁷⁷

⁷⁶ Mulyana Idris dan Muhammad Sahlan, "Antara Salah Paham dan Paham Yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi", dalam *Jurnal Substantia Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, Vol. 20, No. 01, (2018), 80-81.

⁷⁷"Ustadz Farhan Ditolak Ceramah di RSUDZA Banda Aceh", <http://modusaceh.co/news/ustadz-farhan-ditolak-ceramah-di-rsudza-banda-aceh /index.html>. Diakses pada Sabtu, 09 Maret 2019.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Jauh sebelum menjadi pusat Provinsi Aceh, kota tua ini telah menjadi pusat dari Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-13 Masehi dengan nama Banda Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara $05^{\circ} 16'15''$ – $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 16'15''$ - $22'16''$ Bujur Timur.¹

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km² dengan batas-batas, yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar; dan

¹ BPS: *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2017*, (Banda Aceh, 2017), 1-2.

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.²

B. Wilayah Administratif Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2017

No	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ule kareng	6,16
Total		61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2017

Berdasarkan table tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78 km²).

C. Keadaan Demografis Kota Banda Aceh

Secara demografis, penduduk kota Banda Aceh pada tahun 2015 berjumlah 205.303 jiwa yang terdiri dari 128.982 jiwa penduduk laki-laki dan 121.321 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat

² BPS: *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2017*, (Banda Aceh, 2017), 1-2.

dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2015 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.079 jiwa per km². Kecamatan terpadat adalah Baiturrahman (7.789 jiwa per km²), sedangkan kecamatan Kuta Raja (2.471 jiwa per km²) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.944 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.000 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 26.950 jiwa.³ Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Kedaan penduduk Berdasarkan Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh, 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.095	8.945	19.040
2	Jaya Baru	12.682	11.879	24.561
3	Banda Raya	11.584	11.486	23.034
4	Baiturrahman	18.095	17.268	35.363
5	Leung Bata	12.645	12.015	24.660
6	Kuta Alam	25.886	23.820	49.706
7	Kuta Raja	6.897	5.975	12.872
8	Syiah Kuala	18.293	17.524	35.817
9	Ulee Kareng	12.841	12.409	25.250
Jumlah Total	2015	128.982	121.321	250.303
	2014	128.847	121.012	249.499
	2013	128.333	121.949	249.282

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan.

³ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, ..., 4.

Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2013-2015 semakin bertambah. Dari 249.282 jiwa di tahun 2013 naik menjadi 249.499 di tahun 2014 dan bahkan di tahun 2015 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 250.303 jiwa. Bahkan di tahun 2016 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.⁴

D. Profesi Penduduk Kota Banda Aceh

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2015 berjumlah 250.303 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2015 berjumlah 128.982 penduduk laki-laki dan 121.321 orang penduduk perempuan.

Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak.

⁴ BPS: *Kota Banda Aceh Dalam Angka*,..., 34.

Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.⁵



⁵ Observasi Tanggal 10 November 2018

BAB IV

PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TENTANG RADIKALISME AGAMA

A. Perkembangan Islam di Aceh

Aceh merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki peradaban besar dalam sejarahnya. Kebesaran tersebut bukan hanya dilihat dari aspek eksistensi dan pengaruh kerajaan Islam Aceh terhadap Nusantara dan dunia, tetapi juga karena tradisi keilmuan dan kekayaan khazanah ke-Islaman di Aceh yang telah menjadi barometer perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara saat ini.

Dalam sejarahnya yang panjang Aceh memiliki dinamika, pasang surut dan dikagumi oleh kawan dan lawan. Menurut komentar para pengkaji, negeri yang berada di ujung pulau Sumatra ini memiliki masyarakat yang unik, misalnya disebutkan *heroic*, berani, ulet, tanpa mengenal menyerah dan bahkan ada yang menyebutkan dengannya modern. Julukan yang terakhir bermakna kegilaan, yang disebut oleh jurnalis Belanda, RA. Kern. Masyarakat Aceh menurutnya memiliki sifat-sifat kegilaan, suka membuang nyawa atau suka mati dengan melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda yang siaga dengan persenjataan lengkap, padahal mereka tidak memiliki senjata yang berarti untuk mengimbangi senjata lawan (Belanda).¹

Dalam naskah tua *Izhar al-Haqq* yang dirujuk oleh A.Hasjmy, diinformasikan bahwa pada 173 H (789 M), terdapat sebuah kapal asing yang datang dari Teluk Kambay (Gujarat) India singgah berlabuh di Bandar Perlak. Kapal ini di

¹ Misri A. Muchsin, *Potret Aceh dalam Bingkai Sejarah* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), 1.

antaranya membawa para saudagar muslim dari Arab, Persia dan India dibawah pimpinan seorang nahkoda utusan khalifah Bani Abbas, sehingga ia disebut Nahkoda Khalifah.² Tahun-tahun ini, dunia Islam berada dalam kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid (785-809 M) yang berpusat di Bagdad. Bila ini benar, maka sangat wajar kalau khalifah memberi perintah untuk mengembangkan Islam keberbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah timur yaitu di kawasan Nusantara. Apalagi masa Harun ar-Rasyid, dunia Islam mengalami masa kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti digambarkan dalam cerita-cerita seribu satu malam.

Kehadiran rombongan Nahkoda Khalifah di Perlak menyebabkan terjalinnya hubungan dan kontak budaya antar bangsa di wilayah ini. Di samping menjalankan misi dagang, rombongan Nahkoda Khalifah ini juga membawa misi dakwah syiar Islam. Mereka mengajarkan persaudaraan, persamaan, kasih sayang, tolong menolong, bagaimana berniaga, bertani, bermasyarakat dan cara beribadat kepada Allah, sehingga raja dan rakyat Perlak tertarik dan memeluk Islam. Sebelum Islam datang, di Perlak telah berdiri kerajaan yang diperintah oleh raja-raja yang bergelar Meurah berasal dari keturunan raja-raja Syahir Nuwi dari Negeri Syam. Sayid Ali dari suku Qurasisy, salah seorang di antara rombongan Nahkoda Khalifah, kawin dengan Makdhum Tansyuri, adik dari Syahir Nuwi Meurah Perlak. Dari perkawinan inilah, lahir Sayid Abdul Aziz, yang kemudian setelah dewasa dilantik menjadi Sultan Perlak Pertama (225-249 H/840-864 M). Untuk mengingat jasa nahkoda

² A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), 45.

Khalifah, maka ibukota Kerajaan Islam Perlak juga diubah menjadi bandar Khalifah.³

Kerajaan Islam Perlak berkembang dan eksis hingga abad ke-13 M, sebelum akhirnya bergabung dengan Kerajaan Samudera Pasai. Bahkan dalam mengendalikan pemerintahan di Kerajaan Islam Perlak ini, para sultan dipengaruhi oleh paham keagamaan yang dibawa oleh rombongan Nahkoda Khalifah, yaitu Syi'ah dan Sunni. Oleh karenanya ketika kedua paham keagamaan ini sama-sama berpengaruh, maka Perlak pernah dibagi menjadi dua kekuasaan, di wilayah pesisir diserahkan kepada kelompok Syi'ah dan wilayah pedalaman diperintah oleh kelompok Sunni.

Dengan demikian dapat dikatakan di antara para pendatang asal Arab, India dan Persia yang sengaja datang dalam rangka berniaga dan mengemban misi dakwah ke Perlak adalah ulama, seperti Sayed Ali Quraissy dan Qaid al-Mujahidin Maulana Naina al-Malaba'i. Dalam perkembangannya, ada di antara keturtunan mereka yang tampil sebagai sultan. Karena mereka tidak menganut satu paham keagamaan, tetapi ada yang Syi'ah dan ada yang Sunni, maka hal ini juga berpengaruh terhadap tipe kepemimpinannya.

Pada tahun 986 M, Kerajaan Sriwijaya menyerang dan dapat menguasai Perlak hingga beberapa tahun, tetapi kemudian direbut kembali oleh Sultan Makhdum Malik Mansur Syah (1012-1059). Dampak positif ketika mendapat serangan dan diinvasi oleh Kerajaan Sriwijaya adalah semakin meluasnya pengaruh Islam ke daerah di sekitarnya yang dibawa oleh para "pelarian", muhajirin dari

³ Sri Suyanta, "*Pola Hubungan Ulama dan Umara: Pasang Surut Peran Ulama Aceh*", (Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), 62.

Perlak. Di antara mereka kemudian mendirikan kerajaan, seperti Serbajadi di Tamiang.

Edwin M. Loeb, Thomas Arnold dan Hoesein Djajadiningrat sama-sama menjelaskan perihal perlawatan Marco Polo, dimana pada tahun 1291 M dirinya yang bekerja untuk Kubalai Khan di Cina pernah singgah di wilayah Perlak. Di wilayah ini, Marco Polo menemukan jejak atau bekas-bekas peninggalan, setidaknya ada atau pernah ada lima kerajaan kecil di sana, yaitu Ferlec (Perlak), Basma (Pasai), Samara (Samudra), Dagroian (Indagiri), Lambri (Lamuri). Ketika itu, Marco Polo berada di suatu tempat yang bernama Samara di sebelah utara Perlak, selama lima bulan untuk menunggu datangnya angin baik untuk berlayar. Di dekat Samara terdapat tempat yang bernama Basma (Pasai) yang dipisahkan oleh sebuah aliran sungai, kemudian tempat ini dikenal dengan Samudera Pasai. Marco Polo menyaksikan bahwa penduduk Samudra Pasai saat itu telah menganut Islam dan diperintah oleh seorang yang alim.

Kenyataan yang disaksikan oleh Marco Polo, dikuatkan oleh bukti bahwa di daerah Samudera Pasai pernah berdiri sebuah kerajaan Islam, yaitu Samudera Pasai. Menurut Hikayat Raja-raja Pasai dan Sejarah Melayu yang dikutip oleh Yusni Saby, keberadaan Kerajaan Samudra Pasai berawal dari 1042, saat datangnya Meurah Khair (Meurah Giri) keturunan dari sultan Perlak, yang kemudian mendirikan Kerajaan Samudera Pasai dan menjadi raja pertama dengan gelar Maharaja Mahmud Syah berkuasa hingga tahun 1078. Kerajaan ini kemudian mengalami perkembangan yang lebih signifikan pada masa Sultan Malik Salih atau Malikussaleh (1261-1289), yang mulanya Silu, tetapi setelah datangnya ulama Syaikh Isma'il dari Makkah

sekitar tahun 1270-1275 dan Meurah Silu menjadi penguasa di Samudera Pasai, maka kemudian bergelar Sultan Malik Salih (*The Pious King*).⁴

Pada saat Kaisar Yung Lo berkuasa di China pada Tahun 1368, pernah mengirim ekspedisi ke Aceh di bawah pimpinan Laksamana Muhammad Cheng Ho, maka antara China dan Aceh terjalin hubungan yang baik. Saat itu Aceh diperintah oleh Sultan Zainuddin Malik Zahir Berdaulat (1350-1394). Salah satu hadiah dari Kerajaan China untuk Kerajaan Samudera Pasai adalah sebuah lonceng raksasa, Cakra Donya yang hingga sekarang masih dapat disaksikan di Museum Rumoeh Atjeh, Banda Aceh.

Selain Syaikh Isma'il dari Mekah, Kerajaan Samudera Pasai juga didatangi oleh ulama-ulama lain dari Timur Tengah, Persia dan India. Dari India, misalnya, Faqir Ma'abri (Mengir) datang ke Pasai dalam rangka syiar Islam. Sejak ini, Pasai berkembang menjadi Kerajaan Islam yang terkenal di kawasan Asia Tenggara. Bahkan dalam bidang identitas keislaman, pernah terjalin hubungan yang baik antara Kerajaan Pasai, Malaka, Demak dan Blambangan Jawa Timur. Penguasa Malaka, Sultan Mansur Syah pernah meminta kepada ulama Pasai (Makhdum Pematakan) untuk menjelaskan isi kitab Durr Manzum, yang diberikan kepadanya oleh Mawlana Abu Bakr yang datang ke Malaka. Maulana Ishaq, salah seorang ulama Pasai juga dikirim ke Blambangan, Jawa Timur untuk mengembangkan agama Islam. Bahkan ketika Pasai diinvasi oleh Majapahit pertengahan abad ke-14, dakwah Islam ke wilayah Nusantara lainnya tidak terhenti karenanya.

⁴ Yusny Saby, "The ulama in Aceh: A Brief Historical Survey", dalam *Studia Islamika: Indonesia Journal For Islamic Studies*, Vol. 08, No. 01, (2001), 6, 12-15.

Al-Chaidar merujuk pada Tawarikh Raja-raja Kerajaan Aceh karya M. Yunus Jamil dan Tarikh Aceh dan Nusantara karya Haji Zainuddin, menyatakan bahwa Sultan kerajaan Samudra Pasai juga mengirim para dai untuk menyebarluaskan agama Islam ke berbagai wilayah di Nusantara dan wilayah Melayu lainnya. Sidi Abdul Aziz diutus ke Malaka, sehingga Raja Malaka, Parameswara (dari Kerajaan Sriwijaya) memeluk Islam seraya mengganti namanya menjadi Megat Iskandar Syah dan anaknya dikawinkan dengan putri Sultan Zainal Abidin (1383-1400) dari Samudera Pasai. Para da'i Pasai juga sampai di Kedah, sehingga Raja Pra Ang Madan Angsa memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Muzlafaz Syah. Sementara untuk wilayah Patani (Thailand), Islam dibawa oleh ulama Pasai yang bernama Syekh Said, dan bukti sejarah yang sekarang masih bisa disaksikan adalah adanya Makam Tok Pasai di Patani. Penyebaran Islam ke Brunei dan Filipina Selatan dilakukan oleh ulama Pasai lainnya, masing-masing bernama Syaikh Syarif Kasim dan Syaikh Abubakar.

Fatahillah yang dikenal luas dengan Faletahan atau Sunan Gunung Jati juga ulama kelahiran Pasai sekitar tahun 1490. Setelah belajar di Tanah Suci, Fatahillah kembali ke Nusantara dan menuju Banten. Selama di Banten, Fatahillah membantu Kerajaan Demak mengalahkan Sunda Kelapa (Kini Tanjung Priok) dan berhasil mendirikan kota Jayakarta (kini Jakarta). Sejak ini, Islam kemudian menjadi lebih berkembang di Jawa. Penyebaran Islam juga sampai di Cirebon yang dilakukan oleh

Maulana Ishak, di Gresik oleh Maulana Malik Ibrahim dan di Jawa Timur oleh Sunan Ampel.⁵

Era berikutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam, yang eksis sekitar lima abad. Catatan sejarah dalam Tawarikh Raja-raja Kerajaan Aceh menginformasikan bahwa jauh sebelum adanya pengaruh Islam, di ujung Aceh telah berdiri Kerajaan Hindu Indra Purba dengan Lamuri (wilayah yang kini termasuk Aceh Besar) sebagai pusatnya. Setelah menduduki Kerajaan Indra Jaya antara tahun 1059-1069, tentara Tiongkok menyerang Kerajaan Indra Purba yang ketika itu diperintah oleh Maharaja Indra Sakti. Kemudian tentara Tiongkok dikalahkan oleh sekitar 300 orang di bawah pimpinan Syaikh Abdullah Kan'an, yang bergelar syiah Hudan, seorang keturunan Arab Kan'an dari Kerajaan Islam Pureulak. Atas keberhasilan ini, kemudian Maharaja Indra Sakti dan rakyat Indra Purba menganut Islam, bahkan ia mengawinkan putrinya Blieng Keusuma dengan Muerah Johan yang turut mengusir tentara Tiongkok. Setelah Maharaja Indra sakti Meninggal, diangkatlah Meurah Johan sebagai Raja Indra Purba dengan gelar Sultan Alaidin Johan Syah dan nama Kerajaan Darussalam yang berpusat di Bandar Darussalam, pada hari Jum'at, Bulan Ramadhan 601 H (1205 M).⁶

Dalam seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan tanggal 17-20 Maret 1963, Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Hamka menyimpulkan bahwa agama Islam telah datang ke Nusantara secara berangsur-angsur sejak abad ke-1 H/8 M, yang dibawa oleh para

⁵ Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 1999), 22.

⁶ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Waspada, 1981), 38.

saudagar Islam dan dimotori oleh orang-orang Arab, baru kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Haji Abubakar Aceh menarik kesimpulan bahwa *pertama*, Islam masuk ke Indonesia pertama kali melalui Aceh, tidak mungkin dari daerah lain. *Kedua*, penyiara Islam pertama di Indonesia tidak hanya berasal dari India dan Gujarat, melainkan juga dari Arab.

Pada akhirnya, seminar ini menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: *pertama*, menurut sumber-sumber yang diketahui, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriyah (abad ke-7/8 Masehi) langsung dari Arab; *kedua*, bahwa daerah yang pertama didatangi Islam adalah pesisir Sumatera dan setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh.

Pada tahun 1978, seminar serupa diselenggarakan di Banda Aceh. Beberapa di antara rumusan penting yang dihasilkan adalah: *pertama*, sebelum Islam masuk, sudah ada kerajaan – kerajaan di Aceh di antaranya Lamuri dan kerajaan – kerajaan lain yang tersebut dalam sumber asing. *Kedua*, pada abad pertama Hijriah Islam sudah masuk ke Aceh. *Ketiga*, pada masa kerajaan Lamuri, telah tercipta hubungan diplomatik dengan luar negeri – terutama – dengan Cina dan India. *Keempat*, kerajaan-kerajaan Islam yang pertama adalah Perlak, Lamuri, dan Pasai.⁷

Proses berkembangnya Islam di Aceh juga didukung oleh seni (syair-syair Islam) yang meluruhkan hati masyarakat Aceh serta peranan pernikahan antara

⁷ Keputusan Seminar Sejarah Masuk dan berkembangnya Islam di Aceh yang diselenggarakan di Banda Aceh tanggal 10-16 Juli 1978 oleh Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

pedagang muslim dengan masyarakat Aceh pun tidak kalah andil dalam proses berkembangnya Islam di Aceh, karena hasil perkawinan tersebut akan melahirkan generasi penerus demi kelangsungan hubungan keluarga, dan secara otomatis akan terus bertambahnya pemeluk agama Islam di Aceh.⁸

B. Tokoh Agama Islam di Aceh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tokoh* diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.⁹ Tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

Tokoh agama adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun memiliki sejumlah kualitas unggul, seorang tokoh agama mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.¹⁰ Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan tokoh agama di dalam sosial masyarakat memberi pengaruh berupa sugesti, larangan dan dukungan pemahaman keilmuan kepada masyarakat luas untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu.

Selanjutnya, kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibukota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda

⁸ Juwaini & Zulfata, *Aceh dalam Sejarah*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin, 2014), 8.

⁹ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), 68.

¹⁰ Ibnu Sakdan, "Optimalisasi Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya" (Skripsi Ilmu Dakwah, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017), 13.

Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Di Banda Aceh sendiri juga terdapat berbagai agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Dari sekian banyak agama tersebut, masyarakat Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, dengan penganut 272.557 jiwa, dari total 274.237 jiwa.¹¹

Tabel 4.1 Jumlah Penganut Agama Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh, 2015

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1	Meuraxa	21.026	-	-	-	-	21.026
2	Jaya Baru	26.525	8	-	-	-	26.533
3	Banda Jaya	26.640	12	-	-	22	26.674
4	Baiturrahman	45.376	71	8	4	-	45.469
5	Lueng Bata	26.037	78	-	2	-	26.117
6	Kuta Alam	48.745	1.250	28	6	-	50.029
7	Kuta Raja	12.977	68	-	18	-	13.063
8	Syiah Kuala	38.188	21	74	-	-	38.283
9	Ulee Kareng	27.043	-	-	-	-	27.043
	Jumlah	272.557	1.508	12	30	22	274.237

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Aceh mayoritas memeluk agama Islam, dengan persentase 99.38% dari total 274.237 penduduk. Sedangkan agama paling

¹¹ Badan Pusat Statistik Aceh, *Kuta Alam Dalam Angka 2012*.

minoritas adalah Budha dengan persentase 0.008% atau 22 pemeluk agama. Sementara Protestan 0.54%, Katolik 0.04%, dan Hindu 0.01%.

Tokoh agama dalam agama Islam sendiri terdiri dari berbagai kalangan, seperti ulama, ustadz, teungku/pemimpin dayah. Mereka merupakan para cendekiawan muslim yang sangat berpengaruh di kalangan umat. Status tokoh agama mencakup empat komponen; pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan (baik spiritual maupun biologis), dan moralitas.¹²

Salah satu tokoh agama terkemuka di Aceh adalah Ahmad Hasballah Indrapuri (1888-1959), atau dikenal juga dengan Abu Indrapuri adalah salah seorang tokoh ulama reformis di Aceh. Hal ini tampak pada ide-ide pembaharuan sistem pendidikan dan pemurnian ajaran-ajaran Islam yang dilakukan di masyarakat Aceh. Ide-ide reformasi dan pemurnian ajaran Islam ini tentunya tidak lahir serta merta. Pemikiran Ahmad Hasballah tersebut sangat dipengaruhi oleh perjalanan dan tradisi keilmuannya, pemikiran-pemikiran tersebut beliau dapatkan dari dayah-dayah di Aceh dan di Melayu, dan juga dari pendidikannya selama di Mekkah. Kemudian, integrasi dari keimanan dan tradisi keilmuannya menjadikannya Muslim yang visioner dan peka terhadap perkembangan zaman. Sehingga tidak mengherankan jika kontribusi-kontribusinya tidak hanya terdapat dalam sektor pendidikan, tapi juga dalam sektor politik. Hal ini jelas tampak pada usaha-usaha yang dilakukannya dalam memperjuangkan kemerdekaan di Aceh melawan Belanda.¹³

¹² Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 23.

¹³ Baiquni, "Tengku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri: Sebuah Biografi Singkat Ulama Reformis dan Pejuang", dalam *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Vol. 13, No. 01* (2017), 147.

Selain Ahmad Hasballah Indrapuri, juga ada Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba yang berasal dari luar Banda Aceh, yaitu dari Ujong Rimba Kabupaten Pidie, lahir pada bulan Rabi'ul Awal 1328 H/1907 M. Nama utamanya adalah Abdullah, sedangkan nama Teungku atau sering disingkat dengan "Tgk" merupakan gelar sebutan karena Abdullah merupakan salah seorang ulama.¹⁴

Teungku Abdullah Ujong Rimba juga pernah belajar di Mekah dari ulama tasawuf. Selama di Mekah, Teungku Abdullah Ujong Rimba mendalami dasar-dasar ilmu Islam (yang sudah didapatkannya ketika kecil) dan mendalami ajaran Wahabiyah. Hal ini dikarenakan masyarakat di Mekah menganut paham Wahabiyah, sehingga Teungku Abdullah Ujong Rimba terpengaruh, paham tersebut (mengalahkan pendirian dan pengetahuan ajaran tasawufnya sebelumnya). Kondisi ini menyebabkan Teungku Abdullah Ujong Rimba berperan ganda (*multi-parceted*) di dalam ajaran tasawuf. Perubahan pemikiran padanya tersebut bersifat wajar. Hal ini dikarenakan pemikiran tasawuf yang berasal dari Mekah lebih murni dibandingkan dengan ajaran tasawuf yang berasal dari selain Mekah.¹⁵

Selain itu, di Banda Aceh juga terdapat tokoh agama tentunya, salah satunya ialah Ustaz Fakhrudin, yang merupakan seorang dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Ar-raniry Banda Aceh, juga aktif menjadi Imam dan penceramah di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Selain Ustaz Fakhrudin, juga ada Ustaz Fauzi Shaleh dan Ustaz Samsul Bahri, keduanya merupakan dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta juga aktif

¹⁴ Abdullah Ujong Rimba, *Hakikat Islam*, (Banda Aceh: MUI Aceh, 1980), vi-vii.

¹⁵ Ali Hasjmy, *Ulama Aceh: Mujahid Pejuang kemerdekaan dan Pembangun Tamadun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 148.

sebagai penceramah di Masjid Raya Baiturrahman, Fathun Qarib, dan Masjid Jami' Unsyiah, serta para Imam mesjid yaitu Tgk. Zamhuri Ramli, Tgk. Yusbi Yusuf, dan pimpinan dayah Mini Aceh Tgk. Umar Rafsanjani dan Ust. Masrul Aidi pimpinan dayah Babul Maghfirah. Para imam dan pimpinan dayah ini sangat dihormati dan berpengaruh dalam masyarakat karena pemahaman keilmuan keagamaannya yang tinggi.

C. Pemahaman Tokoh Agama Islam di Kota Banda Aceh Tentang Radikalisme

1. Makna Radikalisme Menurut Tokoh Islam

Radikalisme sebagai sebuah paham yang membuat seseorang berperilaku yang banyak meninggalkan unsur-unsur syari'at agama tentu mendapat perhatian di kalangan tokoh agama yang ada di Aceh, sekalipun paham radikalisme ini belum dapat berkembang secara luas di kalangan masyarakat Aceh. Hal ini semua dikarenakan sebagian besar tokoh Agama Islam di Aceh selalu berupaya untuk menghadang masuknya paham radikalisme tersebut ke Aceh. Penolakan terhadap paham radikalisme ini dikarenakan cara pandang tokoh agama yang ada di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh memiliki pemahaman tersendiri tentang makna radikalisme tersebut. Hal ini sebagaimana keterangan beberapa orang narasumber, seperti Zamhuri Ramli, sebagai berikut:

Radikalisme adalah suatu paham yang ingin mengadakan suatu perubahan baik secara politik maupun sosial akan tetapi melalui jalan kekerasan. Secara pribadi saya tidak setuju/tidak mendukung isu radikal atau paham radikal, dikarenakan agama Islam merupakan agama yang penuh cinta dan penuh kasih sayang, dalam Islam tidak ada paksaan, apalagi dalam bidang politik dimana negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung sistem demokrasi.¹⁶

¹⁶ Wawancara: Zamhuri Ramli (40), Imam Rawatib Masjid Raya Baiturrahman dan Pimpinan Zikir Zawiyah Nurun Nabi, Pada Tanggal 7 Desember 2018

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa sosok Zamhuri Ramli memahami radikalisme sebagai sebuah paham yang bertentangan dengan agama baik dalam kehidupan sosial, politik dan sebagainya, hal ini dikarenakan radikalisme dipahami sebagai sebuah paham yang penuh dengan kekerasan yang tidak lagi dengan kelembutan sebagaimana yang terdapat dalam Islam. Penolakan terhadap paham radikalisme ini juga terlihat dari pemahaman Umar Rafsanjani, yang mengatakan bahwa:

Radikalisme merupakan suatu istilah yang tidak semua orang bisa menerimanya, kita selaku umat Islam tidak mau berhadapan dengan radikalisme, walaupun terdapat masalah dalam agama, maka banyak cara lain dalam menjelaskan permasalahan tersebut selain dengan radikal. Seorang/sekelompok umat muslim akan kurang indah dalam menyelesaikan masalah dengan radikalisme.¹⁷

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa tokoh agama yang satu ini memahami paham radikalisme sebagai sebuah paham yang tidak sesuai dengan kaidah agama Islam terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Bahkan Umar Rafsanjani juga mengemukakan bahwa:

Kita selaku umat Islam, ketika ada isu radikal maka dianjurkan umat mengkaji terlebih dahulu apa dan bagaimana isu tersebut, karna ditakutkan karena umat Islam kurang akan pengetahuan akan radikal maka ditakutkan umat muslim akan digiring ke dalam radikalisme tersebut, yang pada ujungnya Islam menjadi terpojok oleh sebab isu radikalisme tersebut. Pihak-pihak yang membenci Islam akan menciptakan suatu isu yang membuat pandangan dunia membenci Islam salah satunya adalah dengan isu radikalisme ini.¹⁸

Dari pernyataan di atas, jelaslah bahwa tokoh agama yang ada di Kota Banda Aceh memahami paham radikal yang tidak bisa diterima mentah-mentah oleh

¹⁷ Wawancara: Tgk. Umar Rafsanjani (40), Pimpinan Dayah Mini Aceh, Pada Tanggal 10 Desember 2018

¹⁸ Wawancara: Tgk. Umar Rafsanjani (40), Pimpinan Dayah Mini Aceh, Pada Tanggal 10 Desember 2018

masyarakat Aceh, melainkan untuk terlebih dahulu umat Islam mengkajinya. Hal ini dikarenakan tokoh agama tersebut memahami radikalisme sebagai sebuah paham yang bertujuan untuk mempojokkan umat Islam yang ada di Aceh. Karena isu radikalisme dinilai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang membenci agama Islam.

Berdasarkan kedua pandangan tokoh agama yang ada di Kota Banda Aceh tersebut, jelaslah bahwa paham radikalisme dimata para pemuka agama Islam ialah paham yang bertujuan untuk memecah belah umat Islam, dengan cara-cara yang radikal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syari'at yang ada dalam Islam itu sendiri. Tidak hanya kedua tokoh agama di atas, tokoh agama lainnya seperti Damanhuri, yang memahami paham radikalisme sebagai berikut:

Radikalisme agama adalah yang tidak sesuai dengan definisi dakwah, Islam itu mengajarkan dengan bijaksana dan pengajaran yang baik. Gerakan radikal didasari oleh penyampaian pedagang atau ceramah dari ustadz-ustadz yang terlalu keras, di Banda Aceh tidak ada radikalisme di luar Aceh ada. Contohnya di Sulawesi Selatan, demo. Radikalisme bertujuan memanasakan umat untuk melakukan hal yang tidak lagi sesuai anjuran agama.¹⁹

Dimata tokoh agama Damanhuri radikalisme ialah paham yang tidak diterima dalam Islam. Hal ini dikarenakan paham ini dapat memecah belah ummah. Paham radikalisme menurutnya lebih mengajak umat agar berbuat sesuatu dengan cara paksaan, sekalipun melanggar ajaran yang ditetapkan dalam Islam. Keberadaan paham radikalisme di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh masih minim dikarenakan para ulama atau tokoh agama selalu mengingatkan masyarakat akan kesalahan isu ajaran paham radikalisme tersebut.

¹⁹ Wawancara: Damanhuri (60), Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-raniry Banda Aceh, Pada Tanggal 13 Desember 2018

Sementara itu Yusbi Yusuf sebagai ketua Imam Mesjid Al-Makmur Kota Banda Aceh mengatakan bahwa

Paham radikalisme itu ialah sebuah paham yang bertentangan dengan hukum negara apalagi dalam hukum agama. Menurutnya pelaku radikalisme adalah pihak-pihak yang sudah tersesat dari aturan negara dan bahkan agama, hal ini dikarenakan kelompok radikal hanya mengutamakan nafsu mereka dalam mencapai tujuannya seperti menjadi penguasa, menganggap dirinya lebih hebat dan paling benar dari orang lain.²⁰

Berbeda dengan pemaknaan beberapa tokoh agama di atas, Mukhlisuddin Ilyas yang merupakan salah seorang peneliti radikalisme dan terorisme memaknai radikal yang berbentuk statis dan radikal destruktif, menurut keterangannya dikatakan bahwa:

Radikal statis ialah pelaksanaan paham radikalisme yang diperbolehkan dalam semua agama termasuk Islam bahkan diajarkan karena dengan adanya sifat radikal yang dimiliki oleh seseorang dia akan dapat menghayati dan memahami cara ibadah, hal ini dikarenakan arti kata radikal itu ialah memahami sesuatu sampai ke akar-akarnya. Sedangkan radikal destruktif ialah paham radikalisme yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok dengan melakukan berbagai cara termasuk kekerasan, seperti memaksa orang lain memeluk suatu agama dan sikap pemaksaan lainnya.²¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa tidak semua perilaku radikal dapat dikatakan sebuah paham radikalisme negatif. Artinya terdapat juga unsur jika seseorang memiliki sikap radikal seperti radikal pada dirinya sendiri untuk beribadah sehingga dapat melawan berbagai godaan maupun rasa malas melaksanakan ibadah. Namun sebaliknya jika radikal itu sudah mengganggu pihak lain bahkan dengan sifat yang tidak senonoh, maka radikal semacam itu diharamkan dalam Islam.

²⁰ Wawancara: Yusbi Yusuf (44), Ketua Imam Mesjid Al-Makmur Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 11 Januari 2019

²¹ Wawancara: Mukhlisuddin Ilyas (37), Kabid Kajian dan Penelitian Forum Koordinasi dan Pencegahan Terorisme, Pada Tanggal 11 Januari 2019

Sekalipun paham ini cenderung mengarah kepada keburukan, namun radikalisme ini juga dapat digunakan ke jalan yang baik diwaktu-waktu tertentu. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh agama Damanhuri, yaitu sebagai berikut:

Menurut saya gerakan radikal tidak dibenarkan, tetapi ada kalanya dibolehkan, kapan? yaitu ketika ada maksiat di wilayah Islam misalnya di Banda Aceh ada tempat prostitusi di hotel, warga Banda Aceh tau namun dibiarkan dilindungi oleh aparat dengan landasan HAM, kemudian masyarakat membakar hotel tersebut. Menurut saya radikalisme tidak dibolehkan dalam Islam tetapi ketika tidak ada jalan maka dibolehkan dengan tujuan untuk kebaikan umat Islam.²²

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa paham radikalisme dimata sebagian tokoh agama tidak selalu dapat mengarah kepada keburukan, melainkan bisa digunakan kepada kebaikan, namun hal semacam ini jika tidak ditemukannya cara lain atau cara yang ditempuh dengan baik tidak lagi direspon oleh pelanggar syariat agama, seperti membiarkan kemaksiatan di perhotelan dan lain sebagainya.

Dari beberapa argumen para tokoh agama di atas, maka jelaslah bahwa pemahaman tokoh agama yang ada di Kota Banda Aceh terhadap radikalisme ialah suatu paham yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena paham ini dapat membuka ruang bagi masyarakat berbuat kekerasan atau pelanggaran dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang berkaitan dengan agama. Bahkan para tokoh-tokoh agama menilai paham ini dapat memecah belah umat Islam satu sama lain.

Sekalipun telah menjadi sebuah larangan terhadap paham radikalisme agar tidak berkembang di kalangan masyarakat, namun paham yang radikal ini bisa dimanfaatkan jika jalan baik dalam menyelesaikan permasalahan seperti pencegahan

²² Wawancara: Damanhuri (60), Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-raniry Banda Aceh, Pada Tanggal 13 Desember 2018

kemaksiatan tidak lagi mendapat toleran dari pelaku kemaksiatan seperti pembakaran dan pembongkaran lokasi kemaksiatan dan lain sebagainya.

2. Ciri-Ciri Radikalisme Menurut Tokoh Islam

Radikalisme sebagai sebuah paham yang telah dianut oleh sekelompok masyarakat yang ada di beberapa kota yang terdapat di Indonesia, memiliki ciri-ciri tersendiri. Para tokoh agama yang ada di Kota Banda Aceh memiliki cara pandang masing-masing terkait ciri-ciri yang terdapat pada paham Radikalisme tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa orang tokoh agama di bawah ini.

Zamhuri Ramli yang merupakan salah satu tokoh agama di Kota Banda Aceh mengemukakan pendapatnya terkait ciri-ciri radikalisme sebagai berikut:

Menurut saya ciri-ciri paham radikal adalah suka menghujat orang lain, memiliki gaya bicara yang keras, suka memaksakan kehendak orang lain, menyalahkan orang dan mengkafirkan orang. Seperti contoh: seseorang yang menyatakan bahwa ajaran Islam tentang maulid itu adalah bid'ah, mensyirikkan pemahaman saudaranya tentang Islam, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan ciri-ciri seseorang terjerumus kedalam sikap radikal.²³

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa ciri utama yang terdapat pada paham radikalisme ialah sikap pengikutnya yang suka menghujat orang lain dengan bahasa yang keras serta memaksakan kehendaknya sekalipun pihak lain menjadi korban. Di Aceh sendiri menurut keterangan Zamhuri Ramli paham ini dapat dilihat dari sikap seseorang seperti pernyataan sebagian orang tentang pelaksanaan maulid perbuatan bid'ah serta menyalahkan perbuatan agama yang dilakukan oleh orang lain.

Di Kota Banda Aceh sendiri menurut keterangan Zamhuri Ramli paham radikalisme sudah mulai berbaur dalam masyarakat yang diperolehnya dari berbagai

²³ Wawancara: Zamhuri Ramli (40), Imam Rawatib Mesjid Raya Baiturrahman dan Pimpinan Zikir Zawiyah Nurun Nabi, Pada Tanggal 7 Desember 2018

media sosial seperti youtube, instagram, twitter, televisi dan lain sebagainya. Hal ini sebagai mana hasil wawancara yang penulis dapatkan sebagai berikut:

Dewasa ini, jika dilihat dimedia-media sosial, maupun media televisi, sudah banyak orang bahkan tokoh masyarakat yang menjerumus ke dalam sikap dan pemahaman radikal, seperti contoh komentar-komentar netizen (warga internet/orang yang aktif di komunitas maya atau internet) khususnya pada bidang politik, para netizen ini tidak sungkan-sungkan menyalahkan orang atau tokoh politik ataupun bahkan pemerintahan dengan hinaan, cacian dan makian yang luar biasa ganas. Kelompok radikal tersebut telah ada dimana-mana diberbagai belahan dunia maupun di Indonesia, bahkan di Aceh sendiri sudah ada kelompok-kelompok radikal seperti tersebut diatas.²⁴

Keterangan di atas juga diperkuat dengan ungkapan salah satu tokoh agama yakni Yusni Sabi yang mengatakan bahwa:

Ketika gerakan itu mengganggu, menakutkan, membuat orang lain tidak nyaman, adanya rasa pengancaman, adanya perlakuan melecehkan kemudian sampai pada teror tersebut. diawali dengan hal diatas. Ada sebagian orang yang mempercayai berita-berita hoax tanpa ada klasifikasinya sehingga dengan mudahnya percaya dan menyebar luaskan. Sehingga alurnya: Pemahaman-bicara-sikap-media sosial ancaman upaya bermusuhan sehingga mengganggu masyarakat, pemerintah, fasilitas umum.²⁵

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa ciri-ciri paham radikalisme di kalangan tokoh agama yang ada di Kota Banda Aceh dapat ditandai secara jelas dari sikap-sikap masyarakat seperti lontaran kata-kata kasar dan berbau hinaan, cacian dan sebagainya baik secara terang-terangan ataupun melalui media-media sosial serta paksaan terhadap orang lain untuk mengikuti keinginan sekelompok pelaku radikalisme. Paham ini sering terlihat disaat adanya permasalahan serius di kalangan masyarakat, tokoh politik dan bahkan juga melibatkan para tokoh agama. Hal ini jelas bertentangan nilai-nilai keislaman, karena di dalam Islam tidak ada paksaan

²⁴ Wawancara: Zamhuri Ramli (40), Imam Rawatib Mesjid Raya Baiturrahman dan Pimpinan Zikir Zawiyah Nurun Nabi, Pada Tanggal 7 Desember 2018

²⁵ Wawancara: Yusni Sabi (75), Guru Besar UIN Ar-raniry Banda Aceh, Pada Tanggal 14 Desember 2018

bagi orang lain seperti terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴿٢٥٦﴾

Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).

Berdasarkan ayat di atas, maka jelaslah bahwa argumen para tokoh-tokoh agama tentang ciri-ciri yang terdapat pada paham radikalisme ini bertentangan dengan Al-Qur'an sebagai sumber pedoman hidup masyarakat Islam. Oleh karena itu para tokoh agama yang ada di Kota Banda Aceh melarang adanya perkembangan paham radikalisme tersebut di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan paham radikalisme dapat memecah belah umat Islam.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Radikalisme Menurut Para Tokoh Agama

Radikalisme yang merupakan suatu paham yang bisa timbul dan berkembang kapan saja tentu dapat mempengaruhi masyarakat banyak untuk bisa ikut serta mempraktekkan apa yang terdapat dalam paham tersebut. Tidak terkecuali di Kota Banda Aceh juga akan bisa terjadinya perkembangan paham radikalisme jika masyarakat tidak mampu menghadapi dengan pengetahuan dan sikap yang bijaksana. Terjadinya radikalisme di kalangan masyarakat menurut tokoh agama di Kota Banda Aceh disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterangan berikut ini.

Saya sudah lama tinggal di Kota Banda Aceh baru-baru ini saja mulai melihat dan mendengar isu-isu radikalisme yang terjadi dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat yang salah, baik mengenai agamanya maupun tentang negaranya. Atau dari pemahaman keagamaan yang berbeda, doktrin yang salah yang dipelajari oleh sebagian masyarakat

dari guru-gurunya berujung pada pemahaman radikal sehingga masyarakat tersebut terdoktrin oleh pemahaman yang keras.²⁶

Bertolak dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa penyebab terjadinya radikalisme agama di kalangan masyarakat disebabkan oleh banyak faktor di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat tentang isi ajaran agama sehingga semua paham yang sejalan dengan agama diterima tanpa melihat dari sudut pandang Islam itu sendiri. Di Kota Banda Aceh hal seperti ini sering terjadi dimana masyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup, melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh bahkan merugikan orang lain. Keterangan di atas juga didukung oleh ungkapan Umar Rafsanjani, bahwa:

Radikalisme bisa terjadi dikarenakan sebagian orang salah pemahaman tentang agama, baik konsep, teks, konteks, sehingga mereka akan yakin dan percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar karena sudah di doktrin dengan prinsip agama yang salah yang mana pada hakikatnya mereka kurang pemahaman agama, mereka berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah akan tetapi salah tafsir, karena untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits butuh ilmu yang tinggi maka tidak bisa ditafsirkan oleh sembarangan orang. Pada hakikatnya salah memahami teks dan dalil.²⁷

Keterangan di atas, jika dibiarkan maka akan merugikan bagi pemerintah dan masyarakat. Dampak negatif keberadaan radikalisme ini sebagai mana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh agama di Kota Banda Aceh Zamhuri Ramli, sebagai berikut:

Menurut saya jika radikalisme ini dipelihara maka akan terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, pemerintah, dan negara. Seperti pemberontakan, pengrusakan dan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas umum, pembunuhan dan bahkan perebutan kekuasaan yang sah dalam suatu negara atau wilayah.²⁸

²⁶ Wawancara: Zamhuri Ramli (40), Imam Rawatib Mesjid Raya Baiturrahman dan Pimpinan Zikir Zawiyah Nurun Nabi, Pada Tanggal 7 Desember 2018.

²⁷ Wawancara: Tgk. Umar Rafsanjani (40), Pimpinan Dayah Mini Aceh, Pada Tanggal 10 Desember 2018

²⁸ Wawancara: Zamhuri Ramli (40), Imam Rawatib Mesjid Raya Baiturrahman dan Pimpinan Zikir Zawiyah Nurun Nabi, Pada Tanggal 7 Desember 2018

Bertolak dari keterangan Zamhuri Ramli di atas menunjukkan bahwa radikalisme dapat mengancam kehidupan suatu pemerintah bahkan suatu negara. Hal ini dikarenakan jika pemerintahan dapat dilemahkan, maka dengan mudah kelompok ini melancarkan tujuannya ke seluruh lapisan masyarakat.

Begitu juga di Kota Banda Aceh paham radikalisme juga mulai terlihat di beberapa tokoh politik yang menjadikan agama sebagai tempat bersembunyi dari radikalisme. Oleh karena itu paham radikalisme juga dapat masuk dan berkembang di kalangan masyarakat melalui persaingan politik. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Zamhuri Ramli bahwa:

Selain faktor minimnya pengetahuan masyarakat, politik juga menjadi salah satu faktor radikalisme agama, para politikus memakai agama sebagai benteng untuk mempromosikan dirinya, dengan kata lain menjual agama sebagai alat politik. Sehingga tidak jarang kasus radikal yang terjadi khususnya di Indonesia berlandaskan politik yang dibungkus dengan agama.²⁹

Jadi jelaslah bahwa faktor penyebab terjadinya radikalisme di kalangan masyarakat juga dapat terjadi karena faktor persaingan politik, yang tentu di dalamnya terdapat para petinggi atau tokoh masyarakat. Oleh karena itu paham ini menurut tokoh agama Islam di Kota Banda Aceh harus dihindari karena akan merusak lajunya kehidupan bangsa dan negara. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusni Sabi, bahwa:

Faktor utama yang menyebabkan timbulnya paham radikalisme ialah politik, kepentingan kekuasaan, dan politik keuntungan proyek, banyak oknum yang berpolitik untuk mencari proyek dengan begitu dia bisa menghasilkan uang yang berlimpah.³⁰

²⁹ Wawancara: Zamhuri Ramli (40), Imam Rawatib Mesjid Raya Baiturrahman dan Pimpinan Zikir Zawiyah Nurun Nabi, Pada Tanggal 7 Desember 2018

³⁰ Wawancara: Yusni Sabi (75), Guru Besar UIN Ar-raniry Banda Aceh, Pada Tanggal 14 Desember 2018

Berdasarkan ungkapan diatas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya radikalisme di kalangan masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dari adanya kepentingan di antara pengikutnya baik kepentingan ekonomi yang bersifat umum maupun kepentingan pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Nasir Zalba:

Radikalisme, terorisme dan aliran sesat disebabkan karena konflik berbeda kepentingan antara satu kelompok dengan lainnya.³¹

Sementara itu Yusbi Yusuf mengatakan bahwa faktor utama penyebab semakin maraknya kasus radikal dikarenakan kelemahan pemerintah dalam memahami aturan hukum yang sudah berlaku, seperti yang dikatakan sebagai berikut:

Menurut saya radikalisme ini bisa berkembang dikarenakan pemerintah memperbolehkan dan bahkan melindungi berbagai perilaku radikal seperti demonstrasi atau pengkritikan suatu kebijakan yang dilakukan oleh sebagian oknum yang mana sebenarnya pihak/oknum tersebut tidak memahami kasus yang dia tuntut.³²

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa di kalangan para tokoh agama berpandangan bahwa pihak pemerintah juga kurang memahami unsur agama yang seharusnya dijalankan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang diterapkan. Banyak di kalangan pemerintah menjalankan roda pemerintahan secara sepihak dengan mengabaikan beberapa unsur agamanya seperti pihak keamanan, penertiban dan lainnya. Selain faktor di atas, Yusbi Yusuf juga mengatakan bahwa penyebab munculnya radikalisme adalah sebagai berikut:

³¹ Wawancara: Nasir Zalba (54), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh, Pada Tanggal 1 Februari 2019

³² Wawancara: Yusbi Yusuf (44), Ketua Imam Mesjid Al-Makmur Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 11 Januari 2019

Banyaknya golongan awam yang terpengaruh dengan hasutan untuk melakukan perilaku radikal. Mereka ini digaji dan disuruh oleh pihak yang memiliki kekayaan untuk memenuhi kepentingannya.³³

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa munculnya radikalisme bukan hanya dari pihak orang terpandang atau memiliki status sosial yang tinggi, melainkan juga dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah yang semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang menyuruhnya.



³³ Wawancara: Yusbi Yusuf (44), Ketua Imam Mesjid Al-Makmur Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 11 Januari 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

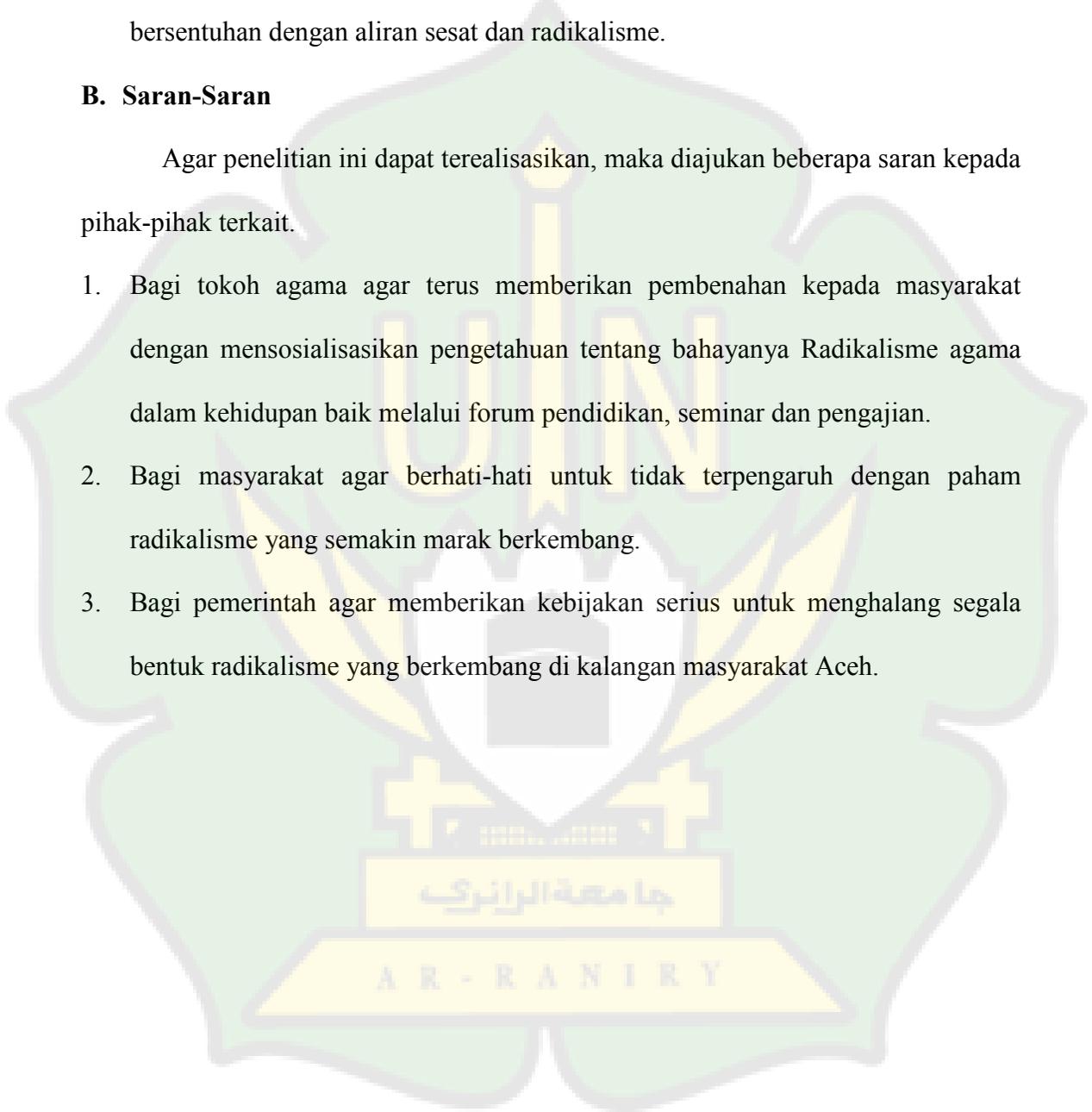
1. Ajaran dan gerakan radikalisme dipahami oleh tokoh agama Islam Kota Banda Aceh sebagai suatu paham yang ingin mengadakan suatu perubahan baik secara politik maupun sosial dengan jalan kekerasan, yang bertentangan dengan nilai-nilai keIslaman. Oleh karena itu ajaran radikalisme ini tidak bisa ditolerir begitu saja, karena ciri gerakannya bersifat merugikan pihak lain seperti suka menghujat gaya bicara yang keras, memaksakan kehendak orang lain, menyalahkan orang dan bahkan mengkafirkan orang.
2. Faktor penyebab terjadinya radikalisme antara lain minimnya pemahaman masyarakat baik mengenai agamanya maupun tentang negaranya, faktor politik dimana para politikus memakai agama sebagai benteng untuk mempro-mosikan dirinya demi kepentingan kekuasaan, adanya hasutan dan penyogokan kepada golongan awam untuk melakukan radikalisme dengan dibayar dan faktor pemerintah yang kurang memahami pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan bernegara.
3. Tokoh agama Islam Kota Banda Aceh merespon keras ajaran dan gerakan radikalisme yakni dengan menunjukkan sikap menolak keberadaan gerakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan negara karena gerakan ini dapat merugikan orang lain serta merusak hubungan baik kehidupan berbangsa, agama dan negara.

4. Salah satu sikap dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di Aceh adalah melalui memperkaya dan memaksimalkan pembelajaran agama seperti tauhid, fiqh dan juga seruan-seruan syari'at Islam untuk melindungi masyarakat bersentuhan dengan aliran sesat dan radikalisme.

B. Saran-Saran

Agar penelitian ini dapat terealisasi, maka diajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait.

1. Bagi tokoh agama agar terus memberikan pembenahan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan pengetahuan tentang bahayanya Radikalisme agama dalam kehidupan baik melalui forum pendidikan, seminar dan pengajian.
2. Bagi masyarakat agar berhati-hati untuk tidak terpengaruh dengan paham radikalisme yang semakin marak berkembang.
3. Bagi pemerintah agar memberikan kebijakan serius untuk menghalang segala bentuk radikalisme yang berkembang di kalangan masyarakat Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Afadlal, dkk. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta : LIPI Press, 2005.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam dan M.Hasbi Amiruddin. *Ulama, Separatisme, dan Radikalisme di Aceh*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. *Memahami Potensi Radikalisme dan Terorisme di Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016.
- Al-Chaidar. *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh mewujudkan Negara Islam*. Jakarta: Madani Press, 1999.
- Alhairi, 'Pendidikan Anti Radikalisme: Ikhtiar Memangkas Gerakan Radikal, Dalam, *Jurnal Tarbawi*. Vol. 14, No. 2, (2017): 112.
- Ali, As'ad Said. *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi: Gerakan-gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Armstrong, Karen. *Perang Suci : dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, Diterjemahkan oleh Hikmat Darmawan. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Aspihanto, Aan dan Fatkhul Muin. 'Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme, Dalam, *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol 03, No 01, (2017): 76-85.
- Asrori, Ahmad. 'Radikalisme di Indonesia: antara Historitas dan Antropisitas, Dalam, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam IAIN Raden Intan Lampung*. Vol 09, No 02, (2015): 258.
- Ba'abduh, Al Ustadz Luqman bin Muhammad. *Sebuah Tinjauan Syari'at: Mereka Adalah Teroris*. Malang: Pustaka Qaulan Sadida, 2005.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Banda Aceh dalam Angka*. Banda Aceh, 2017.
- Badan Pusat Statistik. *Kuta Alam dalam Angka*. Banda Aceh, 2012.
- Baiquni, 'Tengku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri: Sebuah Biografi Singkat Ulama Reformis dan Pejuang, Dalam, *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*. Vol 13, No 01, (2017): 147.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Choueriri, Youssef M. *Islam Garis Keras*. Diterjemahkan oleh Humaidi Syuhud dan M. Maufur. Yogyakarta: Qonun, 2003.

- Hasjmy, Ali. *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Beuna, 1983.
- Hasjmy, Ali. *Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamaddun Bangsa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat: dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Jainuri, Achmad. *Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Juwaini dan Zulfata. *Aceh dalam Sejarah*. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin, 2014.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.
- Kartodirdjo, Sartono. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Khusnul, 'Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Sosial Agama di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21), Dalam *Laporan Penelitian*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.
- Mangunsuwito. *Kamus Saku Ilmiah Populer*. Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011.
- Misri, A. Muchsin. *Potret Aceh dalam Bingkai Sejarah*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Mulyana Idris dan Muhammad Sahlan, 'Antara Salah Paham dan Paham Yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi, Dalam *Jurnal Substantia Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, Vol. 20, No. 01, (2018): 80-81.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasution Harun, *Teologi Islam*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Radikal: Analisis Terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. Diterjemahkan oleh Hamin Murtadho. Solo: Era Intermedia, 2014.
- Qodir, Zuly. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rijal, Syamsul. 'Kepemimpinan Mahasiswa dalam Membendung Radikalisme di Kalangan Kampus, dalam *Kuliah Umum* oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 19 Desember 2017. (m.republika.co.id)
- Rimba, Abdullah Ujong. *Hakikat Islam*. Banda Aceh: MUI Aceh, 1980.

- Rिताudin, M. Sidi. 'Radikalisme Negara dan Kekuasaan Perspektif Politik Global, Dalam, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam IAIN Raden Intan Lampung*. Vol.08, No.02, (2014): 349.
- Ronald. *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Rudy, Teuku May. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Refika Aditama, 1993.
- Ruslan , Idrus. 'Islam dan Radikalisme: Upaya Antisipasi dan Penanggulangannya, Dalam, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 09 No. 02, (2015): 223.
- Saby, Yusny. 'The ulama in Aceh: A Brief Historical Survey, Dalam, *Studia Islamika: Indonesia Journal For Islamic Studies*. Vol. 08, No. 01, (2001): 6-15.
- Said, Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Waspada, 1981.
- Sakdan, Ibnu. "Optimalisasi Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya". Skripsi Ilmu Dakwah, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Terorisme di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.
- Sirry, Mun'im A. *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Suyanta, Sri. "Pola Hubungan Ulama dan Umara: Pasang Surut Peran Ulama Aceh". Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- Syarifuddin. *Agama, Konflik dan Kerukunan: Solusi Mencapai Dialog Menuju Jalan Damai*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2014.
- Taufiqqurrahman. "Peran Nahdlatul Ulama dalam Menangkal Gerakan Radikalisme Global di Indonesia". Skripsi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Ukhro. "Studi Komparasi Proses Awal Islamisasi di Jawa dan di Aceh". Skripsi Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Yunus, A Faiz. 'Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam, Dalam, *Jurnal Studi Al-Qur'an*. Vol. 13, No. 01, (2017): 81-87.
- "Massa Aswaja Padati Banda Aceh", <http://aceh.tribunnews.com/2015/09/10/massa-aswaja-padati-banda-aceh>.
- "Ustadz Farhan Ditolak Ceramah di RSUDZA Banda Aceh", <http://modusaceh.co/news/ustadz-farhan-ditolak-ceramah-di-rsudza-banda-aceh/index.html>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Nomor: B-1961/Un.08/FUF/KP.00.4/12/2017

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang:

- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
- b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama:

Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Suraiya IT, MA., Ph.D
b. Syarifuddin, S. Ag., M. Hum

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Rini Marlina
NIM : 140301045
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Radikalisme Agama dalam Pandangan Tokoh Agama Islam di Kota Banda Aceh

Kedua : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Ketiga : Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Desember 2017
Dekan,


Lukman Hakim

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi AFI Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

No: B-89/Un.08/AFI/Kp.00.9/03/2018

Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : **Rini Marlina**

NIM : 140301045

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar- Raniry.

Adalah benar mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang akan mengadakan penelitian di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian Skripsinya yang berjudul *Radikalisme Agama dalam Pandangan Tokoh Agama Islam di Kota Banda Aceh*. Untuk kelancaran penelitian ini kami mengharapkan kepada semua pihak yang terlibat untuk dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikianlah keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas segala bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 19 Maret 2018

Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam,



Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I

NIP. 197808072011011005

Lampiran 1:

DAFTAR INSTRUMEN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Rini Marlina
NIM : 140301045
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Jenjang Pendidikan : S-1
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jln. Utama Rukoh, Lr. KRH, No. 07
Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh

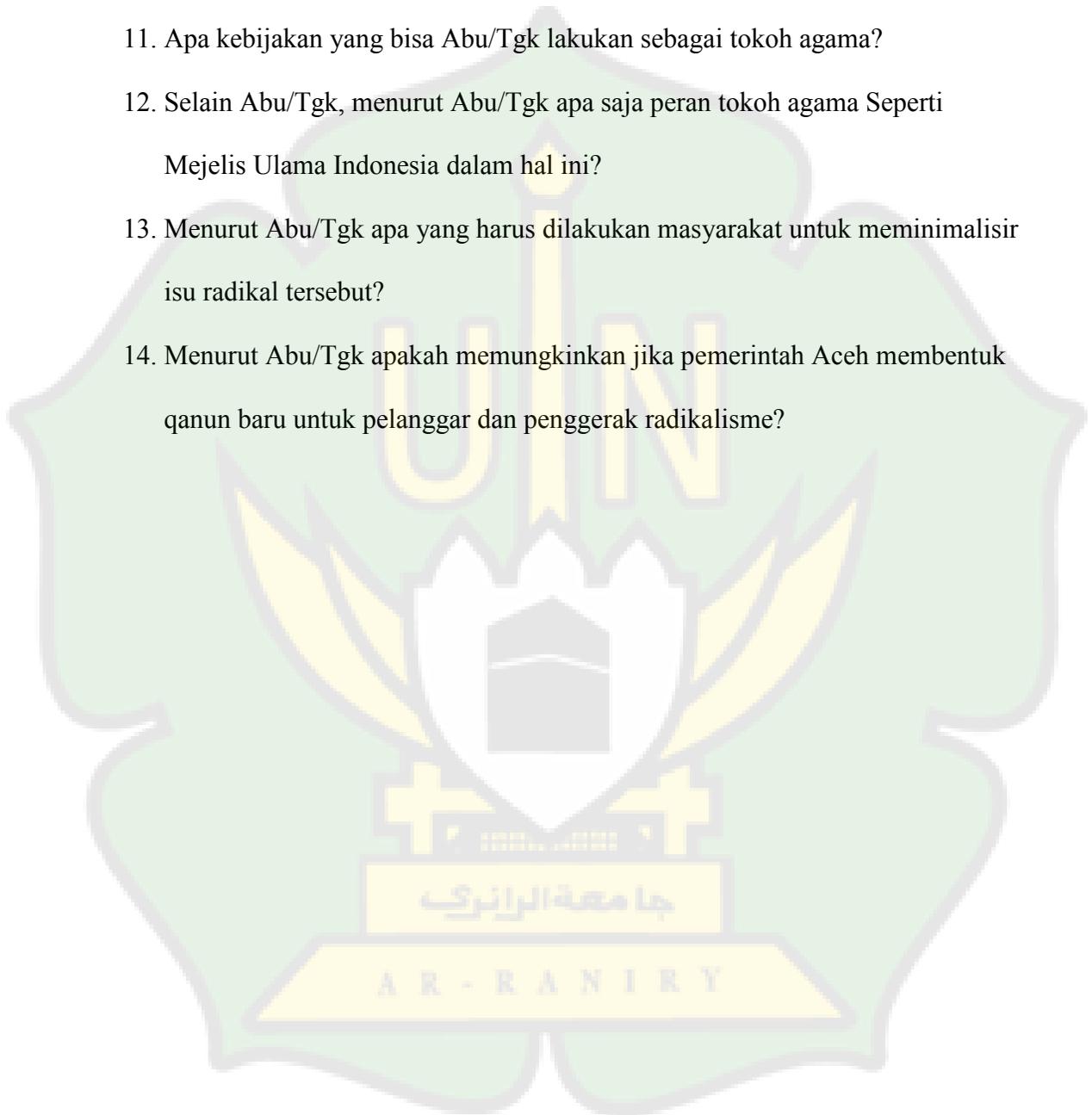
B. Biodata Informan

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Nomor Kontak:

SOAL WAWANCARA

1. Apa yang Abu/Tgk ketahui tentang radikal?
2. Apa pendapat Abu/Tgk mengenai isu radikal?
3. Bagaimana penilaian Abu/Tgk mengenai isu radikal ?
4. Apa ciri-ciri radikal/radikalisme menurut Abu/Tgk?
5. Apa perbedaan Radikal dan Radikalisme menurut Abu/Tgk?
6. Menurut Abu/Tgk, mengapa isu radikalisme terus berkembang?
7. Menurut Abu/Tgk, apa yang menyebabkan radikalisme terus berkembang?
8. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya radikalisme agama?

9. Menurut Abu/Tgk, apakah Indonesia dan Aceh merupakan sarana empuk untuk menebarkan radikalisme?
10. Bagaimana tanggapan Abu/Tgk mengenai pemahaman radikal tersebut?
11. Apa kebijakan yang bisa Abu/Tgk lakukan sebagai tokoh agama?
12. Selain Abu/Tgk, menurut Abu/Tgk apa saja peran tokoh agama Seperti Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini?
13. Menurut Abu/Tgk apa yang harus dilakukan masyarakat untuk meminimalisir isu radikal tersebut?
14. Menurut Abu/Tgk apakah memungkinkan jika pemerintah Aceh membentuk qanun baru untuk pelanggar dan penggerak radikalisme?



Lampiran 2:

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Saat Penulis Mewawancarai Pimpinan Dayah Mini Aceh



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018

Gambar 2. Foto Bersama Usai Penulis Mewawancarai Pimpinan Dayah Mini Aceh



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018

Gambar 3. Saat Penulis Mewawancarai Imam Besar Masjid Al-Makmur Kota Banda Aceh



Sumber: Koleksi Pribadi, 2019

Gambar 4. Saat Penulis Mewawancarai Imam Besar Masjid Al-Makmur Kota Banda Aceh



Sumber: Koleksi Pribadi, 2019

Gambar 5. Saat Penulis Mewawancarai Imam Rawatib Masjid Raya Baiturrahman



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018

Gambar 6. Saat Penulis Mewawancarai Imam Rawatib Masjid Raya Baiturrahman



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Rini Marlina
Tempat/Tgl lahir : Pante Cermin, 10 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/ 140301045
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum menikah
Alamat : Gp. Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh
Email : rinimarlina97.rm@gmail.com

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Zainuddin
Pekerjaan : Tukang Kayu
Nama Ibu : Asnani
Pekerjaan : PNS

3. Riwayat Pendidikan

a. MIN Jeuram : Tahun Lulus 2008
b. SMPN 1 Seunagan : Tahun Lulus 2011
c. SMAN 1 Seunagan : Tahun Lulus 2014
d. UIN Ar-Raniry : Tahun Lulus 2019

4. Pengalaman Organisasi

a. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Filsafat Agama 2016
b. Sumberpost UIN Ar-raniry 2016

Banda Aceh, 10 Januari 2019

Penulis,

Rini Marlina